



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magetan***



 dpupr_magetan

 pupr.magetan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ini dapat terlaksana dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen resmi daerah yang mengarahkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penyusunan Renstra ini memuat beberapa uraian mengenai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dan mempedomani pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih ada kekurangan sempurna baik dari sisi substansi/ materi maupun dari sisi bahasa. Oleh karena itu kritik serta saran kami harapkan guna penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) ini.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan yang dapat kami sampaikan dengan harapan semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mencapai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta memberikan dampak positif bagi kemajuan Masyarakat di Kabupaten Magetan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGETAN



MULTAR WAKID, S.ST., MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19671216 199403 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi II	
Daftar Tabel.....	I
Daftar Gambar.....	II
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Trategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan	30
2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	31
2.1.7 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	32
2.2. Permasalahan Dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah	32
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	34
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	36
3.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	38
3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	42
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	42
Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	45
4.1 Program, Kegiatan Dan Sub-Kegiatan Perangkat Daerah Hasil Cascading Dari Tujuan, Sasaran, Outcome Dan Output.....	45
4.2 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Mengacu Pada Nomenklatur.....	64
4.3 Sub-Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	109

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	112
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	112
Bab V Penutup.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah ASN Berdasarkan Status.....	14
Tabel 2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	14
Tabel 2.3 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 2.4 Jumlah ASN Berdasarkan BIDANG dan UPTD	16
Tabel 2.5 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Tabel 2.6 Data Inventarisasi Aset/Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18
Tabel 2.7 Gedung/Kantor.....	21
Tabel 2.10 Perumusan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan.....	35
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PUPR Kab. Magetan Tahun 2025-2030	41
Tabel 3.2 Penahapan Strategi Dinas PUPR.....	42
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas PUPR Kab. Magetan.....	43
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Magetan	46
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	65
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	109
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kab. Magetan Tahun 2025-2030.....	112
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas PUPR Kab. Magetan Tahun 2025-2030.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	13
Gambar 2.2	Tren Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024	30
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD.....	38
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	39
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan selaku Perangkat Daerah Kabupaten Magetan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah Kabupaten Magetan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan bersifat indikatif, dengan pertimbangan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan salah satu unsur tolok ukur kinerja Kepala Daerah.

Setelah Pilkada serentak di Indonesia, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam waktu 6 bulan setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. RPJMD adalah rencana yang menjabarkan visi, misi, dan program Bupati untuk lima tahun ke depan, fokus pada tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah. Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengikuti RPJMD. Renstra ini berisi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Disusunnya Renstra tersebut merupakan bentuk konkrit dari pelaksanaan perumusan kebijakan operasional atas kewenangan desentralisasi dan pelimpahan kewenangan dan diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program yang dilaksanakan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025, kepala daerah periode 2025-2029 memiliki amanat regulasi untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD ini kemudian menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 2025-2029.

Proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; serta Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045.

Renstra ini merupakan perencanaan tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dan mengikat seluruh komponen/jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang dibuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan untuk dijadikan rujukan dan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan

sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dan melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Selain itu dengan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, diharapkan akan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dituju, dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan paradigma baru pembangunan serta tuntutan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang makin efektif dan efisien, peran pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan akan lebih berfungsi sebagai pengarah dan fasilitator. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan periode Tahun Anggaran 2025 - 2029 dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai landasan hukum. Landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12) ;
 20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Instruksi Menteri Kementrian Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024 nomor 03);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029
 37. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;
 38. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/392/Kept./403.013/2021 tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan untuk selama 5 tahun ke depan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pedoman bagi bidang-bidang merumuskan program/kegiatan serta pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenangnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan antara lain:

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (Lima) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 tahun;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan periode Tahun Anggaran 2025 - 2029 ini disusun berdasar Instruksi Menteri Kementrian Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 1.1 | Latar Belakang | Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah |
| 1.2 | Dasar Hukum Penyusunan | Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 |

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (SPM, SDG's, indikator yang telah di ratifikasi Pemerintah, dan indikator pelayanan perangkat daerah lainnya)
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
Berisi kelompok sasaran yang mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah
Berisi uraian dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
- 2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
Berisi uraian kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan - permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah
Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun rencana

BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
Memuat tentang Tujuan dan Sasaran

- | | | | |
|-----|--|---------------------|---|
| | Renstra Daerah Tahun 2025-2029 | Perangkat Kabupaten | dari Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Yang Menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antar tujuan RPJMD periode berkenaan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah |
| 3.2 | Strategi Daerah dalam Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 | Perangkat Kabupaten | Memuat tentang Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 |
| 3.3 | Arah Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 | Kebijakan Kabupaten | Berisi tentang Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 |

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- | | | |
|-----|---|--|
| | Rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, kinerja, indikator kinerja, dan pagu indikatif. | |
| 4.1 | Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output | Berisi program, kegiatan dan sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output dari pohon kinerja |
| 4.2 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur | Rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, kinerja, indikator kinerja, dan pagu indikatif |
| 4.3 | Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah | Uraian sub-kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah |
| 4.4 | Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah | Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah. |
| 4.5 | Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Berisi target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah |

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU TRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai OPD yang menangani Insfrastruktur selama masa RPD 2024-2026 telah berhasil melaksanakan program / kegiatan di bidang Insfrastruktur di antaranya:

- Untuk SPM urusan Pekerjaan Umum yaitu Persentase Rumah tangga berakses air bersih dan Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi. Adapun pada tahun 2024 Capaian Air bersih sebesar 100,37 % dan untuk sanitasi 102,53 %.
- Sampai dengan tahun 2024 sudah ada 2 produk Rencana Tata Ruang yang sudah diperdakan dan di perbupkan yakni Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan sudah diperdakan pada tahun 2024 menjadi perda nomor 6 Tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten magetan Tahun 2024-2044 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044 sesuai dengan amanat PP 21 Tahun 2021 untuk RDTR WP Karangrejo setelah diperbupkan saat ini dalam progres integrasi kedalam sistem Online Single Submission (OSS).
- Pada bidang bina marga dari panjang jalan 630.25 Km semuanya sudah merupakan jalan aspal dengan kondisi mantap sepanjang 578,77 km.
- Pada bidang Sumber Daya Air defisit air tahun 2023 adalah - 87.800.858 m³ dan kondisi terkini mengalami penurunan sebesar - 84.332.308 m³ dan dalam rangka pengelolaan irigasi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan terbukti dengan di raihnya predikat juara 2 propinsi untuk GHIPPA pada tahun 2022

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Pasal 4 menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki personil sejumlah 259 orang, yang terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasiumum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat membawahi:

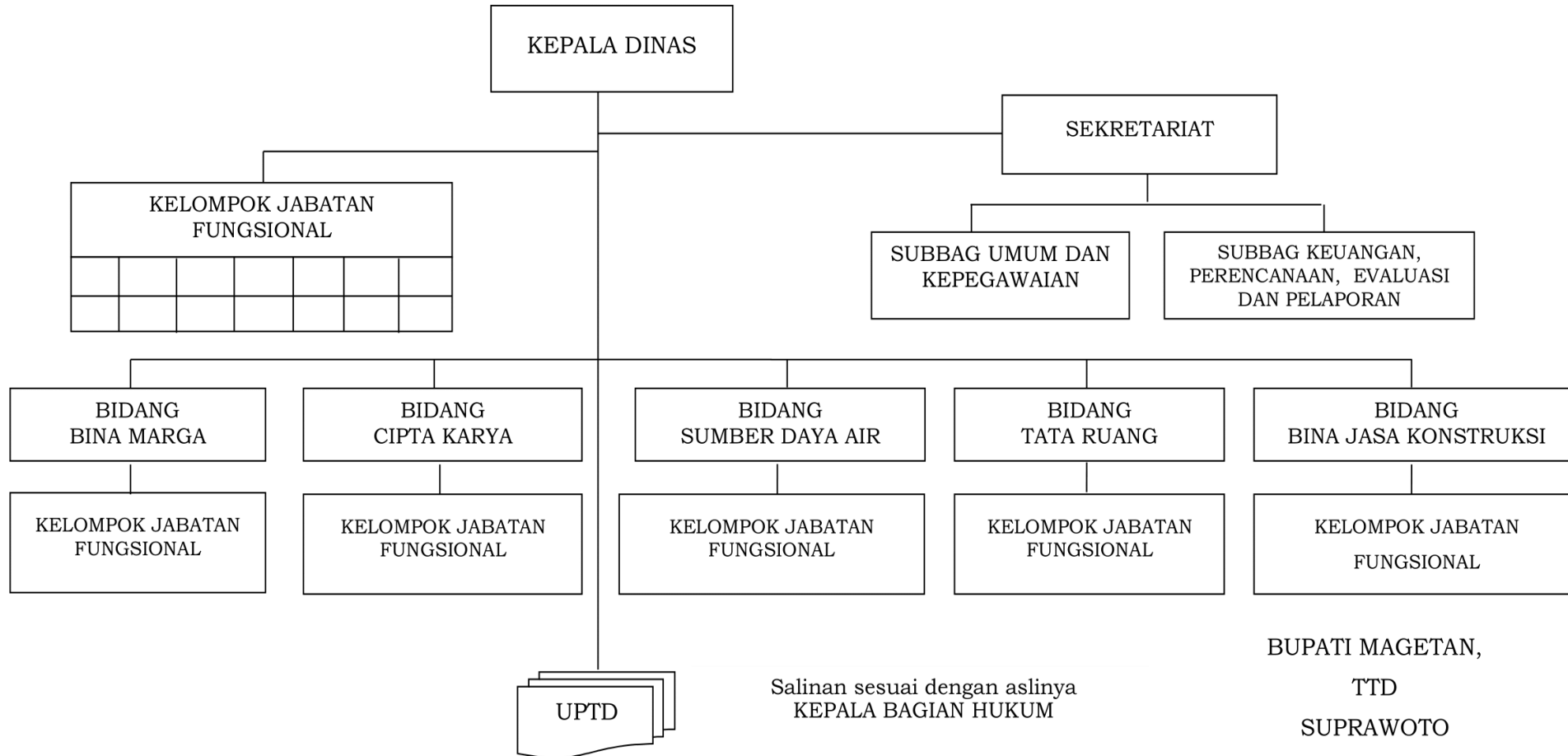
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: melaksanakan ketatausahaan dan kerumah tanggaan; melaksanakan penatausahaan barang pengguna; menyusun pengelolaan arsip; melaksanakan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; melaksanakan manajemen PNS dan mengelola administrasi kepegawaian; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: menyiapkan data penyusunan Dokumen Perencanaan; menyiapkan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan; mengoordinasikan dan menghimpun dokumen penunjang pelaksanaan kegiatan; mengumpulkan dan menyusun bahan Rencana kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA); melaksanakan penatausahaan dan laporan keuangan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3. Bidang Bina Marga**, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pelaksanaan pendataan dan penghimpunan data tentang kondisi jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan sebagai bahan untuk menentukan perencanaan; penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan; penyusunan perencanaan dalam rangka pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan; pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan; penyusunan usulan status ruas jalan; pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada masyarakat dalam usaha pelaksanaan pembangunan atau perbaikan jalan, jembatan yang dilaksanakan secara swadaya; penyusunan dan pembuatan laporan secara periodik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan,jembatan dan bangunan pelengkap jalan; Pengelolaan data legger jalan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 4. Bidang Cipta Karya**, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan teknis dan operasional bidang air bersih, air limbah domestik, sarana dan prasarana persampahan, drainase,

bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungannya; pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan air bersih, air limbah domestik, sarana dan prasarana persampahan, drainase, bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungannya; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis air bersih, air limbah domestik, sarana dan prasarana persampahan, drainase, bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungannya; perumusan dan penyusunan kebijakan dan regulasi bangunan gedung; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. **Bidang Sumber Daya air**, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder sesuai kewenangannya; penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder sesuai kewenangannya; pemberian bimbingan dan rekomendasi teknis sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis; pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pengelolaan serta pemeliharaan sarana prasarana serta kegiatan pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian sumberdaya air; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas..
 6. **Bidang Tata Ruang**, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang; penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang; penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian penataan ruang; penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 7. **Bidang Bina Jasa Konstruksi**, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi. pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi pelaksanaan, dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi melalui pengujian laboratorium; penelitian dan konstruksi; dan pengembangan rekayasa ,pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 8. **UPTD** , UPTD yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan sebanyak 9 UPTD yang terdiri dari 4 UPTD JJCK (UPTD JJCK WILAYAH I, UPTD JJCK WILAYAH II, UPTD WILAYAH III, UPTD JJCK WILAYAH IV) dan 5 UPTD PENGAIRAN (UPTD PENGAIRAN GANDONG, UPTD PENGAIRAN BRINGIN, UPTD PENGAIRAN GONGGANG, UPTD PENGAIRAN JEJERUK, UPTD PENGAIRAN PURWODADI – TAJI); dan
9. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Status

Tabel 2.1 Jumlah ASN Berdasarkan Status

No.	Status	Jumlah (Org)
JUMLAH DINAS PUPR		111
1	PNS	85
2	PPPK	16
3	PPPK PARUH WAKTU	10
JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH I		9
1	PNS	7
2	PPPK	2
JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH II		24
1	PNS	8
2	PPPK	16
JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH III		16
1	PNS	10
2	PPPK	6
JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH IV		21
1	PNS	3
2	PPPK	18
JUMLAH UPTD PPTM GANDONG		14
1	PNS	1
2	PPPK	13
JUMLAH UPTD PPTM BRINGIN		16
1	PNS	5
2	PPPK	11
JUMLAH UPTD PPTM GONGGANG		17
1	PNS	4
2	PPPK	13
JUMLAH UPTD PPTM JEJERUK		17
1	PNS	4
2	PPPK	12
3	PPPK PARUH WAKTU	1
JUMLAH UPTD PPTM PURWODADI TAJI		21
1	PNS	4
2	PPPK	17
T O T A L		266

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

2. Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat / Golongan

Tabel 2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	PANGKAT / GOLONGAN	Jumlah (Org)
JUMLAH DINAS PUPR		111
1	Pembina/Gol. IV	7
2	Penata/Gol. III	67
3	Pengatur/ Gol. II	11
4	Golongan IX	5
5	Golongan V	8

No.	PANGKAT / GOLONGAN	Jumlah (Org)
6	Golongan III	3
7	PPPK PARUH WAKTU	10
JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH I		9
1	Penata/Gol. III	4
2	Pengatur/ Gol. II	3
3	Golongan V	2
JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH II		24
1	Penata/Gol. III	2
2	Pengatur/ Gol. II	6
3	Golongan V	11
4	Golongan III	5
JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH III		16
1	Penata/Gol. III	2
2	Pengatur/ Gol. II	8
3	Golongan V	5
4	Golongan III	1
JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH IV		21
1	Penata/Gol. III	2
2	Pengatur/ Gol. II	1
3	Golongan V	15
4	Golongan III	3
JUMLAH UPTD PPTM GANDONG		14
1	Penata/Gol. III	1
2	Golongan V	13
JUMLAH UPTD PPTM BRINGIN		16
1	Penata/Gol. III	3
2	Pengatur/ Gol. II	2
3	Golongan V	11
JUMLAH UPTD PPTM GONGGANG		17
1	Penata/Gol. III	3
2	Pengatur/ Gol. II	1
3	Golongan V	12
4	Golongan III	1
JUMLAH UPTD PPTM JEJERUK		17
1	Penata/Gol. III	3
2	Pengatur/ Gol. II	1
3	Golongan V	11
4	Golongan III	1
5	PPPK PARUH WAKTU	1
JUMLAH UPTD PPTM PURWODADI TAJI		21
1	Penata/Gol. III	4
2	Golongan V	16
3	Golongan III	1
TOTAL		266

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

3. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN TERAKHIR	Jumlah (Org)
JUMLAH DINAS PUPR		111
1	Sekolah Dasar (SD)	3
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	43
3	Diploma III	4
4	Sarjana Strata -1	53

No.	PENDIDIKAN TERAKHIR	Jumlah (Org)
5	Sarjana Strata -2	8
JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH I		9
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	7
2	Diploma III	1
3	Sarjana Strata -1	1
JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH II		24
1	Sekolah Dasar (SD)	4
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	5
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	14
4	Sarjana Strata -1	1
JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH III		16
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	13
3	Sarjana Strata -1	2
JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH IV		21
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	3
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	16
3	Sarjana Strata -1	2
JUMLAH UPTD PPTM GANDONG		14
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	13
2	Sarjana Strata -1	1
JUMLAH UPTD PPTM BRINGIN		16
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	13
2	Diploma III	1
3	Sarjana Strata -1	2
JUMLAH UPTD PPTM GONGGANG		17
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	14
2	Diploma III	1
3	Sarjana Strata -1	2
JUMLAH UPTD PPTM JEJERUK		17
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	12
3	Sarjana Strata -1	3
JUMLAH UPTD PPTM PURWODADI TAJI		21
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	17
3	Sarjana Strata -1	3
T O T A L		266

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

4. Jumlah ASN Berdasarkan BIDANG dan UPTD

Tabel 2.4 Jumlah ASN Berdasarkan BIDANG dan UPTD

No.	Status	Jumlah (Org)
1	SEKRETARIAT	29
2	BINA MARGA	23
3	CIPTA KARYA	19
4	BINA JAKON	16
5	TATA RUANG	10
6	SUMBER DAYA AIR	14

No.	Status	Jumlah (Org)
7	WILAYAH 1	9
8	WILAYAH 2	24
9	WILAYAH 3	16
10	WILAYAH 4	21
11	PPTM JEJERUK	17
12	PPTM GANDONG	14
13	PPTM TAJI - PURWODADI	21
14	PPTM BRINGIN	16
15	PPTM GONGGANG	17
	Jumlah	266

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

5. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.5 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	JENIS KELAMIN	Jumlah (Org)
	JUMLAH DINAS PUPR	111
1	LAKI - LAKI	82
2	PEREMPUAN	29
	JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH I	9
1	LAKI - LAKI	7
2	PEREMPUAN	2
	JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH II	24
1	LAKI - LAKI	24
2	PEREMPUAN	0
	JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH III	16
1	LAKI - LAKI	15
2	PEREMPUAN	1
	JUMLAH UPTD JJCK WILAYAH IV	21
1	LAKI - LAKI	20
2	PEREMPUAN	1
	JUMLAH UPTD PPTM GANDONG	14
1	LAKI - LAKI	14
2	PEREMPUAN	0
	JUMLAH UPTD PPTM BRINGIN	16
1	LAKI - LAKI	14
2	PEREMPUAN	2
	JUMLAH UPTD PPTM GONGGANG	17
1	LAKI - LAKI	16
2	PEREMPUAN	1
	JUMLAH UPTD PPTM JEJERUK	17
1	LAKI - LAKI	16
2	PEREMPUAN	1
	JUMLAH UPTD PPTM PURWODADI TAJI	21
1	LAKI - LAKI	19
2	PEREMPUAN	2
	TOTAL	266

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

6. Jumlah Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.6 Data Inventarisasi Aset/ Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama	Vol	Kondisi	Tahun
1	AC Split	3 unit	Baik	2007, 2022, 2023
2	AC Unit	1 unit	Baik	2017
3	Alat Penghancur Kertas	2 unit	1 baik, 1 rusak ringan	2015, 2020
4	Alat Pengukur Tebal	1 unit	Baik	2003
5	Alat Uji Komperator	1 unit	Baik	2022
6	Alat Uji Kuat Lentur	1 unit	Baik	2020
7	Alat Ukur	1 unit	Baik	2014
8	Balanccce	1 unit	Baik	1995
9	Brankas	4 unit	1 baik, 3 rusak ringan	
10	Chain Saw	4 unit	2 Mutasi Ke BLH 2 Baik	
11	Concrete Pump	1 unit	Baik	2023
12	Concrete Hammer Test	2 unit	Baik	2022
13	Concrete Mixer/Pengaduk Beton	1 unit	Baik	1989
14	Container	1 unit	Baik	2005
15	Core Hardness Tester	1 unit	Baik	2017
16	Diesel Injection Pump Tester	2 unit	Baik	2022
17	Diesel Smoke Meter	1 unit	Baik	2022
18	Cutting & Welding Kit	1 unit	Baik	2022
19	Core Sampler	1 unit	Baik	2020
20	Destilasi Aspal	1 unit	Baik	2018
21	Filling Besi/Metal	14 Unit	Baik	
22	finger print	3 unit	Baik	2018 , 2008
23	Facsimile	1 unit	Baik	1996
24	Drill Machine	1 unit	Baik	2002
25	Filter	1 unit	Baik	2002
26	Genset	2 unit	Baik	2022
27	Gordyn/Tirai	1 unit	Baik	2009
28	Global Position Satelite (GPS)	2 unit	Baik	2012, 2014
29	Generator	2 unit	Baik	2000, 2022
30	Handy Cam	1 unit	Baik	2014
31	Hard Disk	13 Unit	Baik	
32	Handy Talky (HT)	5 unit	Baik	
33	Jaringan CCTV	1 unit	Baik	2022
34	Jack CBR	1 unit	Baik	1995
35	Kunci Pas satu Set	1 unit	RUSAK BERAT (aset masih berfungsi temuan BPK LKD 2021)	2013
36	Kursi Besi / Metal	3 unit	Baik	1998, 2000, 2020

No	Nama	Vol	Kondisi	Tahun
37	Kursi kayu/Rotan/Bambu	1 unit	Baik	2014
38	Kursi Rapat	4 unit	Baik	
39	Kursi Putar	5 unit	Baik	
40	Kursi Biasa	3 unit	Baik	
41	Kursi Lipat	1 unit	Baik	2020
42	Kipas Angin	7 unit	Baik	
43	Karpet / Permadani	1 unit	Baik	2010
44	LCD Proyektor	8 unit	Baik	
45	Layar Proyektor	1 unit	Baik	2022
46	Lampu Lalulintas (Traffic Light)	3 unit	Baik	2010
48	Lampu Hias	1 unit	Baik	2010
49	Lap Top	26 unit	Baik	
50	Layar Film	1 unit	Baik	2014
51	Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2 unit	Baik	2011
52	Lemari Besi/Metal	5 unit	Baik	
53	Lemari Kaca	19 Unit	Baik	
54	Lemari Kayu	14 Unit	Baik	
55	Lemari Es	2 unit	Baik	2002, 2017
56	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	8 unit	Baik	
57	Macadan Roller/Three Wheel Roller	1 unit	stom wales 2,5 ton (RUSAK RINGAN)	2015
58	Memori Programmer	1 unit	Baik	2009
59	Meja Kayu/Rotan	13 Unit	Baik	
60	Meja Rapat	4 unit	Baik	
61	Meja Podium	2 unit	Baik	1989, 2008
62	Meja Panjang	1 unit	Baik	2000
63	Meja Cetakan	2 unit	Baik	1995, 1995
64	Meja Komputer	2 unit	Baik	2012, 2014
65	Meja Gambar	7 unit	Baik	
66	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 unit	Baik	2009
67	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2 unit	Baik	2012, 2015
68	Meja Kerja	1 unit	Baik	2013
69	Mesin Bor Beton	1 unit	Baik	2020
70	Mesin Kompresor	1 unit	RUSAK RINGAN	2000
71	Mesin Las Listrik	1 unit	RUSAK RINGAN	2006
72	Mesin Bor Tangan	1 unit	Baik	2008
73	Mesin Gergaji	1 unit	RUSAK RINGAN	2017
74	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 unit	Baik	2015
75	Mesin Ketik Manual Longewagen (18..)	1 unit	RUSAK RINGAN	2002
76	Mesin Ketik Elektronik	1 unit	Baik	2012
77	Mesin Hitung Manual	3 unit	2 Baik, 1 RUSAK RINGAN	2011, 2012, 2006
78	Mesin Absensi	1 unit	Baik	2020
79	Mesin Penghisap Debu	1 unit	Baik	2019
80	Mesin Potong Rumput	11 unit	Baik	

No	Nama	Vol	Kondisi	Tahun
81	Microphone	1 unit	Baik	2021
82	Monitor	5 unit	Baik	2008, 2013, 2023
83	Modem	1 unit	Baik	2011
84	Mikroskop Dengan Kamera	3 unit	Baik	2013
85	Mikrohidro	1 unit	Baik	2019
86	Pick Up	6 Unit	3 Rusak ringan 3 baik	
87	Papan Visuil	1 unit	Baik	2001
88	Papan Nama Instansi	2 unit	Baik	2012
89	Papan Pengumuman	1 unit	Baik	2019
90	Papan Tulis	1 unit	Baik	2000
91	Overhead Projektor	1 unit	Baik	1996
92	P.C. Unit	34 Unit	Baik	
93	Note Book	7 unit	Baik	
94	Plotter	1 unit	Baik	
95	Printer	47 unit (termasuk printer dot mix)	baik	
96	Rak Besi/Metal	3 unit	2 Baik,1 rusak ringan	2022, 2023, 2006
97	Rak Kayu	5 unit	Baik	2008 , 2007, 1990, 2014
99	Rambu /Bak Ukur	1 unit	Baik	2006
100	Sumersible Pump	12 unit	Ds.Pragak/ Kontrak Pemboran + Pengadaan/Mesin Genset & Pompa Submersible (RUSAK RINGAN)	2007
101	Station Wagon	17 unit	7 Rusak ringan 10 Baik	
103	Sepeda Motor	111 unit	11 Baik, 100 rusak ringan	
104	Sound System	5 unit	Baik	1997, 2001, 2008, 2017, 2022
105	Scanner	2 unit	Baik	2011, 2017
106	Sand Sample & Sand Container	1 unit	Baik	2018
107	Slot Mortise and Boring Machine	1 unit	Baik	2018
108	Tandam Roller	1 unit	Baik	2012
109	Truck + Attachment	5 unit	4 Baik, 1 rusak ringan	1989, 1995, 2015, 2019, 2017
110	Tripot	1 unit	Baik	2006
111	Tool Kit Set	1 unit	Baik	2006
112	Treker	1 unit	Baik	2006
113	Tenggem	1 unit	Baik	2006

No	Nama	Vol	Kondisi	Tahun
114	Test Generator	1 unit	Baik	2022
115	Termometer Standard	1 unit	Baik	2022
116	Teralis	1 unit	Baik	2010
117	Tempat Sampah	3 unit	Baik	2004, 2005, 2007
118	Televisi	5 unit	Baik	1995, 2002 2001 2019, 2021
119	Tandon Air (Bak Penyimpan Air)	1 unit	Baik	2020
120	Toilet Portable	2 unit	Baik	2017, 2019
121	Theodolit	4 unit	Baik	1978, 2002, 2014
122	Telephone (PABX)	2 unit	Baik	2002, 2022
123	Tiang Listrik	1 unit	Baik	2011
124	Wheel Excavator	3 unit	Baik	2014, 2018, 2020
125	Vibration Roller	5 unit	rusak ringan	1980, 1982, 1983, 2003
126	Walles	1 unit	Baik	2017
127	Wireless	2 unit	Baik	1980, 2020
128	Unit Power Supply	1 unit	Baik	2015
129	Uninterrupted Power Supply (UPS)	4 unit	Baik	2002, 2008, 2014
130	Wireless	2 unit	Baik	
131	Unit Power Supply	1 unit	Baik	
129	Uninterrupted Power Supply (UPS)	4 unit	Baik	

Sumber : Pengurus Barang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

Tabel 2.7 Gedung/Kantor

No.	Nama	Jml	Lokasi	Ket
1	Kantor Dinas	10 Gedung	Jl.Hasanudin No.19	

Sumber : Pengurus Barang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Magetan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan diukur melalui capaian indikator kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengampu urusan sosial. Adapun kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan yang dapat disajikan adalah capaian kinerja tahun 2020-2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Infrastruktur			✓	-	81,9	82,3	82,75	88,45	-	88,1	88,29	88,36	88,99	-	1,08	1,07	1,07	1,01
2	Persentase Lahan yang Terlayani Irigasi (%)		✓		92,93	92,95	92,97	92,99	-	93,19	93,2	93,21	93,22	-	1,003	1,003	1,003	1,002	-
3	Proporsi Rumah Tangga Berakses Air Minum (%)		✓		94,5	92,47	92,97	-	-	93,88	92,6	93,15	-	-	0,99	1,001	1,002	-	-
4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)		✓		-	-	-	93,47	-	-	-	-	93,83	-	-	-	-	1,004	-
5	Persentase rumah tangga berakses air bersih (SPM)		✓		-	-	-	-	93,75	-	-	-	-	94,1	-	-	-	-	1,004
6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)		✓		94	92,75	93,33	93,75	-	94	40	92,39	96,22	-	1,00	0,43	0,99	1,03	-
7	Persentase rumah tangga berakses sanitasi (SPM)		✓		-	-	-	-	94	-	-	-	-	96,38	-	-	-	-	1,025
8	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)		✓		77,11	74,88	74,9	74,93	-	73,87	74,88	81,61	84,9	-	0,96	1,00	1,09	1,13	-
9	Persentase Jembatan Kondisi Baik			✓	78,18	79,18	80,18	81,18	-	78,33	79,26	81,73	82,66	-	1,002	1,001	1,02	1,02	-
10	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat			✓	70,55	71,64	71,99	72,34	-	71,29	71,44	72,06	72,46	-	1,01	0,997	1,001	1,002	-
11	Persentase bangunan yang			✓	34	43,5	43,8	44	-	34	43,5	43,8	44,33	-	1,00	1,00	1,00	1,008	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	sesuai peruntukannya (%)																		
12	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi			✓	-	10,6	27	41,52	-	-	21,1	41,52	55	-	-	1,99	1,54	1,32	-
13	Ruang publik yang berubah peruntukannya			✓	-	26	47	68	-	-	20,8	62,5	68	-	-	0,80	1,33	1,00	-
14	Indeks Layanan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum			✓	-	-	-	-	76,70	-	-	-	-	78,89	-	-	-	-	1,03
15	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			✓	-	-	-	-	45,69	-	-	-	-	48,37	-	-	-	-	1,06
16	Nilai SAKIP Dinas PUPR			✓	-	-	-	-	90	-	-	-	-	93,28	-	-	-	-	1,04
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas PUPR			✓	-	-	77	88,99	89	-	-	77	88,99	89	-	-	1,00	1,00	1,00

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	77,000,000	0	0	0	0	72,696,000	0	0	0	0	94.41%	0	0	0	0	0	0
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6,687,571,900	0	0	0	0	6,062,184,947	0	0	0	0	90.65%	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Jalan & Jembatan	23,439,015,650	0	0	0	0	20,148,341,693	0	0	0	0	85.96%	0	0	0	0	0	0
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1,619,087,500	0	0	0	0	158,232,050	0	0	0	0	9.77%	0	0	0	0	0	0
Program Pembangunan turap/talud/bronjong	3,717,536,826	0	0	0	0	3,211,528,150	0	0	0	0	86.39%	0	0	0	0	0	0
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	57,720,139,852	0	0	0	0	45,773,151,165	0	0	0	0	79.30%	0	0	0	0	0	0
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	75,000,000	0	0	0	0	38,362,100	0	0	0	0	51.15%	0	0	0	0	0	0
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	100,000,000	0	0	0	0	95,025,600	0	0	0	0	95.03%	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1,750,000,000	0	0	0	0	1,671,848,281	0	0	0	0	95.53%	0	0	0	0	0	0
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	596,000,000	0	0	0	0	523,828,400	0	0	0	0	87.89%	0	0	0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Bahan Bangunan	336,799,350	0	0	0	0	333,926,700	0	0	0	0	99.15%	0	0	0	0	0	0
Program Rehabilitasi/Perbaikan Jalan dan Jembatan	2,571,631,680	0	0	0	0	2,371,152,350	0	0	0	0	92.20%	0	0	0	0	0	0
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	12,147,326,600	0	0	0	0	11,636,278,078.55	0	0	0	0	95.79%	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	15,091,561,200	0	0	0	0	14,084,937,801	0	0	0	0	93.33%	0	0	0	0	0	0
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	20,118,953,631	0	0	0	0	19,048,730,804.75	0	0	0	0	94.68%	0	0	0	0	0	0
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2,882,050,000	0	0	0	0	2,821,362,398	0	0	0	0	97.89%	0	0	0	0	0	0
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	7,393,736,200	0	0	0	0	6,198,909,244	0	0	0	0	83.84%	0	0	0	0	0	0
Program pengendalian banjir	1,813,375,000	0	0	0	0	1,776,929,254	0	0	0	0	97.99%	0	0	0	0	0	0
Program pembangunan dan pengendalian Bangunan Gedung	8,982,258,875	0	0	0	0	7,839,210,563	0	0	0	0	87.27%	0	0	0	0	0	0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Perencanaan Tata Ruang	1,488,000,000	0	0	0	0	1,364,837,180	0	0	0	0	91.72%	0	0	0	0	0	0
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	95,000,000	0	0	0	0	80,407,900	0	0	0	0	84.64%	0	0	0	0	0	0
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	0	17,772,664,102	17,550,058,056	16,823,127,442	19,162,474,586	0	15,461,645,099	16,261,596,620	16,290,377,308	18,319,831,315	0	87.00%	92.66%	96.83%	95.60%	0.03	0.06
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	0	16,157,700,405	27,630,798,900	19,468,250,958	19,629,697,000	0	15,708,161,621	25,931,777,686	18,410,061,167	19,044,491,817	0	97.22%	93.85%	94.56%	97.02%	0.14	0.13
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0	5,463,104,000	7,376,794,000	6,021,247,925	6,487,196,000	0	4,127,030,323	6,487,827,840	5,033,028,188	6,056,599,395	0	75.54%	87.95%	83.59%	93.36%	0.08	0.18
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0	0	2,851,742,050	3,134,482,500	0	0	0	2,840,038,437	3,116,348,785	0	0	0	99.59%	99.42%	0	.10	.10
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0	1,315,000,000	2,440,526,950	11,222,006,850	5,528,679,000	0	1,278,405,054	2,393,347,396	9,131,575,895	5,299,214,390	0	97.22%	98.07%	81.37%	95.85%	1.32	1.09
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	0	5,705,500,000	11,199,865,672	6,013,049,175	6,230,611,200	0	777,901,225	10,758,287,558	5,829,395,539	5,934,549,620	0	13.63%	96.06%	96.95%	95.25%	0.18	4.13
Program Penataan Bangunan Gedung	0	3,250,000,000	15,035,570,000	19,530,218,750	17,481,886,158	0	2,598,833,802	14,110,970,937	19,047,619,063	16,428,901,113	0	79.96%	93.85%	97.53%	93.98%	1.27	1.55
Program Penyelenggaraa n Jalan	0	52,304,906,046	109,929,866,813	104,548,301,821	60,529,803,000	0	13,958,444,566	83,505,919,336	96,881,677,172	58,135,716,487	0	26.69%	75.96%	92.67%	96.04%	0.21	1.58

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	0	583,295,150	1,029,622,000	545,992,650	745,000,000	0	565,909,225	982,757,281	527,362,754	701,866,152	0	97.02%	95.45%	96.59%	94.21%	0.22	0.20
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0	805,600,000	804,300,000	747,861,650	933,000,000	0	757,235,428	781,385,792	744,159,133	914,463,066	0	94.00%	97.15%	99.50%	98.01%	0.01	0.07
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	0	2,574,148,500	0	0	0	0	2,572,638,718	0	0	0	0	99.94%	0	0	0	0	0
TOTAL	168,702,044,264	105,931,918,203	195,849,144,441	188,054,539,721	136,728,346,944	145,311,880,659.30	57,806,205,061	164,053,908,883	175,011,605,004	130,835,633,355	85.46%	69.84%	84.60%	85.36%	78.12%	11.13%	28.41%

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan yang bergerak di sektor infrastruktur dan pekerjaan umum selama periode Renstra 2020 hingga 2024 menunjukkan performa yang konsisten melampaui target pada mayoritas Indikator Kinerja Kunci (IKK). Data realisasi menunjukkan bahwa, meskipun target dari indikator yang ditetapkan mengalami banyak perubahan dari tahun 2020 hingga 2024, namun keberhasilan dicapai melalui pelaksanaan program yang efektif, terutama dalam aspek peningkatan kualitas infrastruktur fisik dan sumber daya manusia.

I. Kinerja Sektor Infrastruktur Dasar (Air dan Sanitasi)

Kinerja dalam penyediaan layanan dasar, yaitu air minum dan sanitasi, menunjukkan keberhasilan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Pada indikator Proporsi Rumah Tangga Berakses Air Minum (%), setelah sedikit di bawah target pada tahun 2020 (99%), capaian berhasil mencapai 100% pada tahun 2021 dan 2022. Demikian pula, indikator yang lebih ketat, yaitu Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs) untuk tahun 2023, berhasil mencapai rasio 100% (Realisasi 93.83% dari Target 93.47%), menegaskan komitmen terhadap kualitas layanan berkelanjutan. Capaian Persentase rumah tangga berakses air bersih (SPM) untuk tahun 2024 juga mencapai 100% (94.1% dari Target 93.75%).

Aspek sanitasi menunjukkan hasil yang bervariasi namun berhasil dipulihkan. Indikator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%) mengalami penurunan realisasi yang signifikan pada tahun 2021, di mana capaian hanya 40% (Rasio 43%) dari target 92.75%. Penurunan drastis ini dikarenakan pada tahun tersebut adanya perbedaan asumsi jumlah pemanfaat dalam 1 (satu) SR (Sambungan Rumah) antara SPM KEMENTERIAN PU dengan hasil audit dari auditor. Namun, perangkat daerah berhasil melakukan pemulihan luar biasa, mencapai 92.39% pada tahun 2022 (99% Rasio) dan melampaui target pada tahun 2023 dengan realisasi 96.22% (Rasio 103%). Konsistensi pemulihan ini diperkuat oleh capaian Persentase rumah tangga berakses sanitasi (SPM) tahun 2024 yang juga mencapai rasio 103% (96.38% dari Target 94%).

II. Kinerja Sektor Konektivitas (Jalan, Jembatan, dan Drainase)

Sektor konektivitas menunjukkan capaian realisasi yang progresif dan melebihi ekspektasi.

Indeks Infrastruktur menjadi salah satu indikator dengan kinerja terbaik. Mulai tahun 2021, realisasi selalu berada di atas target dengan rasio antara 107% hingga 108%, menunjukkan bahwa keseluruhan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dikelola melebihi rencana.

Pada Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam), setelah sedikit tertinggal di tahun 2020 (96% Rasio), kinerja melonjak tinggi di tahun-tahun berikutnya: 100% (2021), 109% (2022), dan mencapai puncaknya di 113% pada tahun 2023. Capaian ini sangat luar biasa mengingat target yang ditetapkan cenderung konservatif (sekitar 74-77%), menunjukkan adanya percepatan dan efisiensi dalam program pemeliharaan dan peningkatan jalan.

Persentase Jembatan Kondisi Baik juga menunjukkan realisasi yang stabil dan melebihi target, dengan rasio capaian konsisten di angka 100% hingga 102% dari tahun 2020 hingga 2023. Stabilitas capaian jembatan ini krusial untuk menjaga kelancaran konektivitas regional.

Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, menunjukkan capaian stabil di sekitar 100% hingga 101%, yang menandakan bahwa upaya pencegahan banjir dan genangan air telah dilaksanakan sesuai rencana.

III. Kinerja Sektor Tata Ruang dan Kelembagaan

Kinerja pada aspek non-fisik dan kelembagaan juga menunjukkan hasil yang positif.

Indikator yang terkait dengan tata ruang dan pembangunan gedung, Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya (%), menunjukkan rasio capaian konsisten 100% hingga 101%, menandakan pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan pembangunan. Demikian pula, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada tahun 2024 melampaui target dengan rasio 105.87%.

Salah satu capaian paling menonjol adalah Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi. Target yang ditetapkan meningkat secara signifikan dari 10.6% (2021) menjadi 41.52% (2023). Realisasi menunjukkan bahwa upaya peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan secara masif, menghasilkan rasio capaian yang ekstrem: 199% (2021), 154% (2022), dan 132% (2023). Capaian ini menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam program sertifikasi dan pelatihan, yang merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hasil pekerjaan konstruksi di masa mendatang.

Di sisi kelembagaan, Indeks Layanan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Nilai SAKIP Dinas PUPR untuk tahun 2024 sama-sama melampaui target dengan rasio masing-masing 102.86% dan 103.64%. Ini menegaskan bahwa tata kelola dan akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah berada pada level yang sangat baik. Terakhir, Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas PUPR mencapai 100% di tahun 2022 dan 2023, mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi harapan publik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja perangkat daerah dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dikategorikan Sangat Baik. Hampir semua IKK, baik fisik maupun manajerial, mencapai atau melampaui target. Keberhasilan yang paling menonjol adalah kualitas jalan (mencapai 113% Rasio), peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi (mencapai 199% Rasio), dan pemulihan cepat capaian sanitasi setelah penurunan tajam di tahun 2021. Realisasi ini mencerminkan komitmen kuat, manajemen program yang efektif, dan alokasi sumber daya yang optimal, menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan jaringan irigasi, peran HIPPA GHIPPA sebagai mitra perangkat daerah sangat diintensifkan sehingga pencapaian kinerja bidang irigasi sesuai dengan kewenangan akan lebih optimal. Dengan melibatkan HIPPA GHIPPA dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan jaringan irigasi dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pengawasan dan pemantauan yang lebih baik juga dapat dilakukan, sehingga potensi penyalahgunaan dan kerusakan dapat diminimalkan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani dan kinerja bidang irigasi secara keseluruhan.

Selain HIPPA GHIPPA Mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan Adalah Asosiasi Pelaku Jasa Konstruksi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sebagai dinas teknis yang membidangi jasa konstruksi perlu untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan asosiasi jasa konstruksi, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konstruksi di Kabupaten Magetan. Dengan berkoordinasi dan bekerjasama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat memperoleh masukan dan saran dari asosiasi jasa konstruksi terkait dengan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan konstruksi. Selain itu, kerja sama ini juga dapat membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pelaku konstruksi di Kabupaten Magetan, sehingga kualitas konstruksi dapat meningkat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, koordinasi dan kerja sama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan asosiasi jasa konstruksi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konstruksi di Kabupaten Magetan.

Dinas PUPR juga bermitra dengan APSPAMS atau Asosiasi Pengelola SPAM yang secara khusus membidangi SPAM Jaringan Perpipaan Air Minum Perdesaan yang dikelola oleh masyarakat (PAMSIMAS, HIPPAM, dll.).Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sebagai dinas teknis yang membidangi infrastruktur air minum perlu untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan APSPAMS. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan air minum perdesaan di Kabupaten Magetan.Dengan berkoordinasi dan bekerjasama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat memperoleh masukan dan saran dari asosiasi terkait mengenai kebutuhan teknis, kebijakan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan konstruksi SPAM perdesaan.Kerja sama ini juga dapat membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pelaku konstruksi di tingkat perdesaan, sehingga kualitas konstruksi SPAM menjadi lebih baik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, koordinasi dan kerja sama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kedua mitra, PERUMDAM Lawu Tirta dan APSPAMS, sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air minum di Kabupaten Magetan secara menyeluruh

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam pencapaian kinerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Magetan melibatkan dukungan BUMD dalam hal ini PDAM Lawu Tirta hal ini dikarenakan untuk mencapai capaian kinerja

persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui spam jaringan perpindahan terlindungi dan bukan jaringan perbedaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten Magetan merupakan akumulasi kinerja pelayanan air minum kabupaten Magetan di mana satuan kerja yang melaksanakannya adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan PDAM Lawu Tirta, sehingga untuk lebih mengoptimalkan capaian kinerja persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui spam jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perbedaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten Magetan hubungan dan koordinasi perlu selalu dijaga dan selalu ditingkatkan

2.1.7 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam menentukan batas wilayah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan juga melakukan kerja sama dengan kabupaten lain yang berbatasan langsung. Kerja sama ini dilakukan untuk memastikan bahwa batas wilayah antara Kabupaten Magetan dan kabupaten lainnya dapat ditentukan secara jelas dan akurat. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak dapat melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menentukan batas wilayah yang sesuai dengan kondisi geografis dan administratif. Dengan demikian, kerja sama ini dapat membantu meningkatkan ketertiban administrasi dan mengurangi potensi konflik terkait dengan batas wilayah.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2025-2029 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan, diperlukan perumusan Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja dalam pelayanan publik.

Permasalahan atau masalah secara terminologi adalah kondisi timpang (gap) antara kenyataan (fakta) dengan harapan (ekspektasi) sehingga memerlukan strategi yang terencana dan terukur sebagai upaya jalan keluar (solusi) atas masalah yang ada. Kabupaten Magetan memiliki berbagai permasalahan di bidang infrastruktur dasar yang meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, jaringan irigasi dan sarana prasarana lain yang terkait dengan bidang tersebut. Kondisi tersebut tentu saja membutuhkan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang lebih terukur, terarah melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif yang dapat diawali dengan identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga dapat dirumuskan langkah- langkah solutif melalui strategi dan kebijakan serta program pembangunan.

Permasalahan infrastruktur dasar di wilayah Kabupaten Magetan sering dikaitkan secara dominan oleh masyarakat pada

permasalahan kondisi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan penyediaan sarana parasarana air bersih dan sanitasi. Hal tersebut tentu dapat dimaklumi karena berbagai infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan dasar dan utama yang dibutuhkan masyarakat serta berperan penting dalam perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan Nasional selama dua dekade kebelakang dalam periode RPJPN 2005-2025 telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang pembangunan. Akan tetapi dalam menggarungi perencanaan pembangunan kedepan terdapat tantangan perubahan yang cukup tinggi baik dari dinamika sosial, ekonomi, terlebih dinamika perubahan lingkungan oleh karenanya dalam menetapkan Visi dan Misi Pembangunan jangka Panjang Nasional maka perlu membaca dan menganalisa berbagai kemungkinan serta menyimpulkannya ke dalam isu pembangunan yang menjadi titik tekan dalam menentukan langkah demi langkah perwujudan pembangunan nasional. Adapun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah dipetakan beberapa isu, salah satunya pembangunan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah provinsi yang memiliki potensi perekonomian tinggi di Pulau Jawa, sehingga potensi yang dimiliki harus mampu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, diperlukan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil kesepakatan Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategi RPJPD Kabupaten Magetan didapatkan 8 isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis yang merupakan isu dengan nilai tertinggi Kabupaten Magetan, salah satu diantaranya adalah kurangnya Penegakan pengendalian pemanfaatan lahan. Adanya pengembangan kegiatan perekonomian akan dapat berdampak negatif apabila tidak terdapat regulasi pemanfaatan ruang. Pengembangan kegiatan tersebut akan berpotensi meningkatkan alih fungsi lahan di Kabupaten Magetan. Peningkatan alih fungsi lahan akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung khususnya pangan dan air. Pada 6 muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi dijelaskan bahwa beberapa daerah di Kabupaten Magetan memiliki status daya dukung air yang defisit. Hal tersebut harus diperhatikan. Begitu juga dengan daya dukung pangan, walaupun daya dukung pangan masih mencukupi tetapi harus diperhatikan alih fungsi lahan pertaniannya agar tidak terjadi defisit daya dukung dan daya tampung pangan di tahun-tahun berikutnya. Selain berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup alih

fungsi lahan juga dapat berpengaruh terhadap timbulnya bencana alam khususnya tanah longsor dan banjir.

Dalam konteks pembangunan wilayah, teridentifikasi beberapa permasalahan krusial terkait dengan infrastruktur. Pertama, layanan air minum dan sanitasi yang belum optimal dan berkelanjutan, menciptakan tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya, infrastruktur jalan, jembatan, dan konektivitas daerah belum mencapai tingkat optimal, menghambat pertumbuhan dan mobilitas di wilayah tersebut. Pengembangan lahan dan pemanfaatan jaringan irigasi juga masih menghadapi kendala, mempengaruhi sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Yang tidak kalah pentingnya, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih belum optimal, memberikan dampak signifikan pada efektivitas dan keberlanjutan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Menghadapi permasalahan tersebut, muncul isu strategis yang sangat relevan, yaitu "Optimalisasi Infrastruktur konektivitas, distribusi, pemanfaatan lahan, Jaringan Irigasi, air minum, dan sanitasi". Isu ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur dalam berbagai aspek, dari konektivitas hingga manajemen sumber daya alam yang mana merupakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan agar terlaksananya Optimalisasi Infrastruktur konektivitas, distribusi, pemanfaatan lahan, Jaringan Irigasi, air minum, dan sanitasi yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat pelayanan publik, memperbaiki mobilitas dan konektivitas, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya air di Kabupaten Magetan.

Adapun Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Magetan Urusan Pekerjaan Umum diantaranya adalah:

1. Belum meratanya kualitas layanan infrastruktur ;
2. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah, antar moda ekonomi , antar moda pariwisata , antar moda pendidikan dan antar moda kesehatan ;
3. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang;
4. Belum optimalnya layanan jaringan irigasi;
5. Masih tingginya devisit air pada Kab. Magetan;
6. Belum optimalnya penyediaan akses Dan Layanan Sanitasi Dan Air Minum pada masyarakat;
7. Belum optimalnya peserta pelatihan dan Lembaga Jasa Konstruksi;
8. Belum optimalnya penyelenggaraan Gedung Negara, Bangunan Publik Dan Cagar Budaya.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan fenomena atau permasalahan yang belum tertangani secara optimal dalam periode lima tahun sebelumnya, serta menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis (Renstra) saat ini. Selain itu, isu strategis juga lebih berorientasi pada kondisi yang berupa potensi masalah atau peluang yang perlu diantisipasi di masa depan.

Penetapan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan didasarkan pada hasil reviu terhadap berbagai aspek strategis. Reviu singkat terhadap aspek-aspek tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.10 Perumusan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DINAS PUPR
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi cakupan infrastruktur Pekerjaan Umum yang lebih luas dan berkelanjutan	Belum Optimalnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengembangan investasi bidang pariwisata dan usaha mikro 2. Peningkatan alih fungsi lahan di sekitar kawasan pariwisata dan perkotaan 3. Perlunya Peningkatan konektivitas wilayah dan pengelolaan Sumber Daya Air 4. Peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan 5. Resiko peningkatan bencana alam 6. Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas Politik dan Ekonomi Global (Geopolitik Geoekonomi) 2. Kebutuhan Air dan Sanitasi yang Layak 3. Perubahan Iklim Secara Global 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Pertanian dan ketahanan pangan, ketahanan energi dan Industri pengolahan 2. Sebagian besar wilayah telah terhubung dengan jaringan jalan Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 3. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana 4. Penguatan Lingkungan yang Berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah 2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan 3. Pemerataan pembangunan Penunjang Kluster Ekonomi 4. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Ketahanan Pangan 2. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur Pekerjaan umum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 3. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Jasa Konstruksi Daerah Melalui Penguatan Kompetensi SDM dan Ketertiban Penyelenggaraan Infrastruktur 4. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat mencakup seluruh aspek infrastruktur dasar (sanitasi dan air bersih) yang Berkelanjutan 5. Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan program/kegiatannya tidak hanya berdasarkan tugas dan fungsinya tetapi juga harus mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada periode RPJMD baru ini, Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan pada periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

MAGETAN NYAMAN, mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

MAGETAN MAJU, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

MAGETAN BERKELANJUTAN, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

1. SDM ANDAL - Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
2. KOMODITAS UNGGUL - Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
3. BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
4. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan
5. EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran
6. INFRASTUKTUR MANTAP - Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan antar Wilayah
7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang “Guyub Rukun”, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau

Dalam kerangka perencanaan strategis, Misi Politis sejumlah 7 misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, ditransformasikan menjadi 4 tujuan guna menyederhanakan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan. Proses transformasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan esensi dan makna orisinal dari masing-masing Misi Kepala Daerah. Secara lengkap diuraikan dalam tabel berikut:

VISI	MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. SDM ANDAL - Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat 7. MAGETAN HARMONIS – Membangun Kehidupan Masyarakat yang “Guyub Rukun”, Aman, Tenteram beraskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	1. Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		3. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan
		4. Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat
2. KOMODITAS UNGGUL - Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan 5. EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran 6. INFRASTRUKTUR MANTAP - Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan antar Wilayah 7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang "Guyub Rukun", Aman, Tenteram beraskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	2. Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Investasi Daerah
		2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
		3. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah berbasis Potensi Unggulan
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan
		5. Menurunnya Angka pengangguran melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan
		6. Menurunnya Tingkat Resiko Bencana
3. BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan	3. Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik
		4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		5. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN
		6. Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah
4. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan	4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat
		2. Mengurangi Ketimpangan antar Wilayah

Sesuai tugas dan fungsi pokoknya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai peran untuk mensukseskan Misi Ke-6 dengan tujuan **“Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan”** yang diturunkan ke sasaran **“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah”**

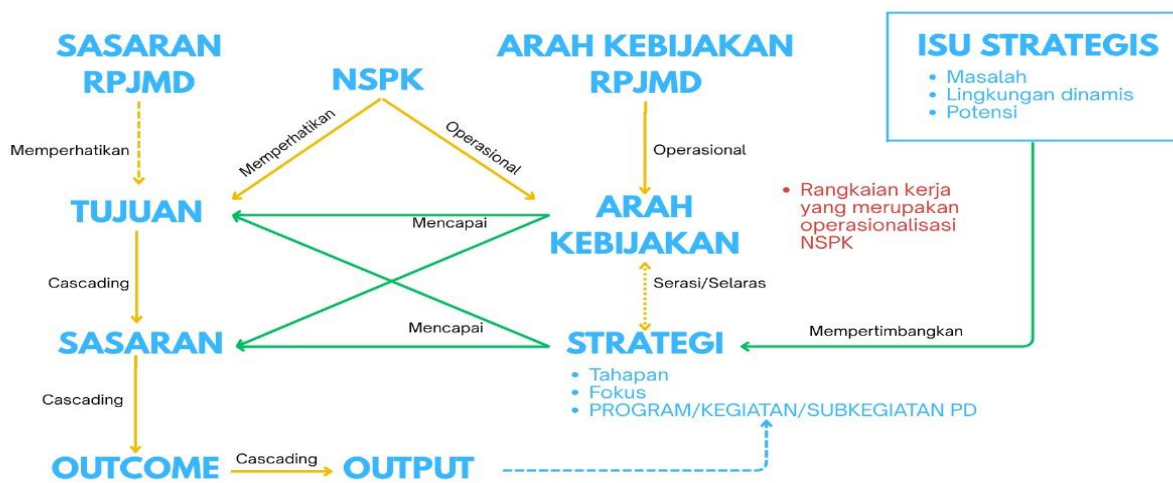
3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi organisasi dalam kurun waktu Renstra. Rumusan tujuan menjelaskan arah umum yang hendak dicapai, sedangkan sasaran memformulasikan hasil yang diharapkan secara lebih terukur dan spesifik. Penyusunan tujuan dan sasaran ini memperhatikan isu-isu strategis daerah serta permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magetan, sehingga menjadi dasar dalam memilih strategi, kebijakan, dan program yang tepat.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Adapun Konsep dari Renstra Perangkat Daerah bisa dilihat pada bagan di bawah ini yang menunjukkan bagaimana sasaran RPJMD, NSPK, arah kebijakan RPJMD, dan isu strategis saling mempengaruhi perumusan tujuan → sasaran → strategi → program/kegiatan → output → outcome. Pada Intinya: tujuan diambil dari sasaran RPJMD dengan memperhatikan NSPK; arah kebijakan mengoperasionalkan RPJMD; strategi dirumuskan selaras dengan arah kebijakan dan mempertimbangkan isu strategis; lalu strategi dicascading menjadi program/kegiatan yang menghasilkan output yang pada akhirnya memberi kontribusi pada outcome.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

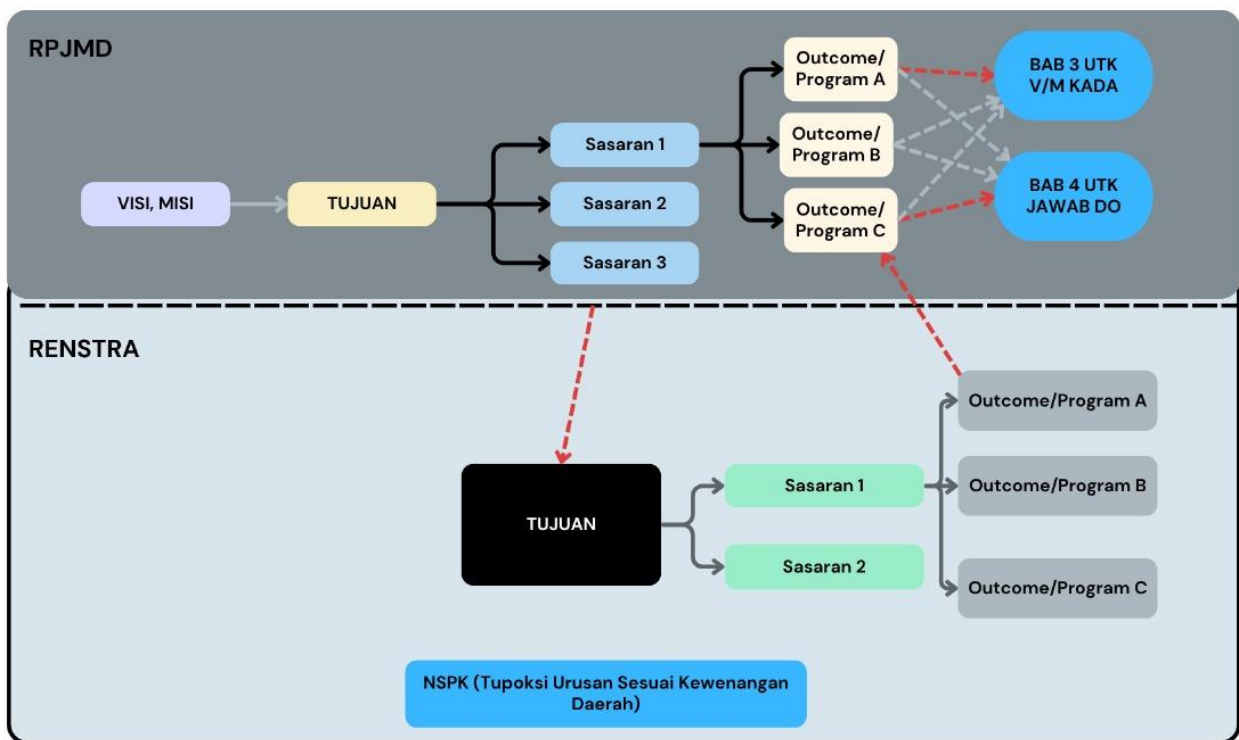
Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang

sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

- Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
- Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
- Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
- Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPd (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana yang diamanatkan dalam RJPMD Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 1 Tujuan dengan 2 sasaran yang dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Misi	MAGETAN NYAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN
Visi	Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah
Tujuan RPJMD	Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
SASARAN RPJMD	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
Tujuan OPD	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Sasaran OPD	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas PUPR

TUJUAN:

1. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Penjelasan: Tujuan ini menegaskan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memperkecil kesenjangan kualitas dan ketersediaan infrastruktur antar wilayah di Kabupaten Magetan. Upaya pemerataan meliputi pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan, drainase, jembatan, irigasi, dan fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan Indikatornya adalah Indeks Infrastruktur Pekerjaan umum Indikator tersebut dipilih untuk mengukur tingkat capaian pemerataan infrastruktur secara komprehensif, mencakup aspek ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas.

SASARAN:

Berdasarkan tujuan di atas, ditetapkan dua sasaran strategis yang menjadi fokus selama periode Renstra:

Sasaran 1 :Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum

Penjelasan: Sasaran ini menargetkan perluasan dan pemenuhan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum pada wilayah wilayah pada kabupaten Magetan. Kegiatan tersebut meliputi Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, Meningkatkan kualitas irigasi, Meningkatkan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir, Meningkatkan akses air minum yang aman, Meningkatkan akses sanitasi layak dan aman, Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya, Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat,serta Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan. Dengan Indikator: Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum

Sasaran 2 :Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas PUPR

Penjelasan: Untuk menjamin manfaat infrastruktur bagi masyarakat, peningkatan mutu layanan publik dan tata kelola menjadi hal krusial. Peningkatan akuntabilitas meliputi penguatan perencanaan, penganggaran, transparansi pelaksanaan, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi.

Mempunyai 2 (dua) Indikator yaitu:

- Nilai SAKIP
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adapun Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PUPR Kab. Magetan
Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -						KETERANGAN	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NSPK: Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah urusan Pekerjaan Umum Sasaran RPJMD yang relevan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	1		1,1 Indeks Infrastruktur Pekerjaan umum Indeks	62,22	63,87	64,71	65,56	66,20	67,24		
		1,1,1	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	1.1.1 Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum %	62,73	65,10	66,90	69,22	70,65	72,40	IKU
		1,2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas PUPR	1.2.1 Nilai SAKIP Nilai	93,29	94,08	94,09	94,10	94,11	94,12	IKU
				1.2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Skor	89,01	89,02	89,03	89,04	89,05	89,06	IKU

3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Penahapan Renstra seperti yang tersajikan dalam table di bawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Strategi Dinas PUPR

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Basis Data Infrastruktur, dan optimalisasi infrastruktur yang sudah ada	Optimalisasi dan peningkatan cakupan infrastruktur	Review Basis Data Infrastruktur dan Optimalisasi infrastruktur	Optimalisasi dan peningkatan cakupan infrastruktur	Optimalisasi dan peningkatan cakupan infrastruktur

3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas yang memandu pencapaian tujuan suatu organisasi atau program pembangunan, yang mencerminkan visi, misi, serta prioritas pembangunan sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Kebijakan ini menjadi pedoman untuk merancang strategi dan program yang komprehensif, sinergis, dan berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki arah kebijakan yang jelas dan terfokus untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dan penataan ruang yang efektif. Adapun Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Magetan Sebagai Berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas PUPR Kab. Magetan

Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
NSPK: Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah urusan Pekerjaan Umum	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas ;	Meningkatnya akses infrastruktur urusan pekerjaan umum (antara lain air minum, sanitasi dan infrastruktur konektivitas)
	Praservasi dukungan jalan ruas jalan madiun - magetan	Preservasi Jalan alternatif Madiun-Magetan
	Penguatan infrastruktur Pendukung dan Konektivitas kawasan strategis	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah
	Penguatan moda transportasi terintegrasi menuju kawasan Pariwisata unggulan, permukiman, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik	Peningkatan kondisi infrastruktur konektivitas antar kawasan pariwisata, pendidikan dan kesehatan
	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder kewenangan Kabupaten
	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura	Peningkatan ketersediaan air irigasi pada MT 3
	Pengelolaan dan Pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/ pestisida/ pakan organik	Pengintegrasian Kebijakan LP2B, KP2B dan LBS kedalam Rencana Tata Ruang
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	Penguatan perencanaan RTR berbasis data dan kajian lingkungan (KLHS) dalam penyusunan dan peninjauan RTR
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	
	Pengelolaan limbah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan limbah terpadu dengan pengembangan circular economy	Meningkatnya akses sanitasi layak
Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan dan kesatuan lanskap ekologis.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang	

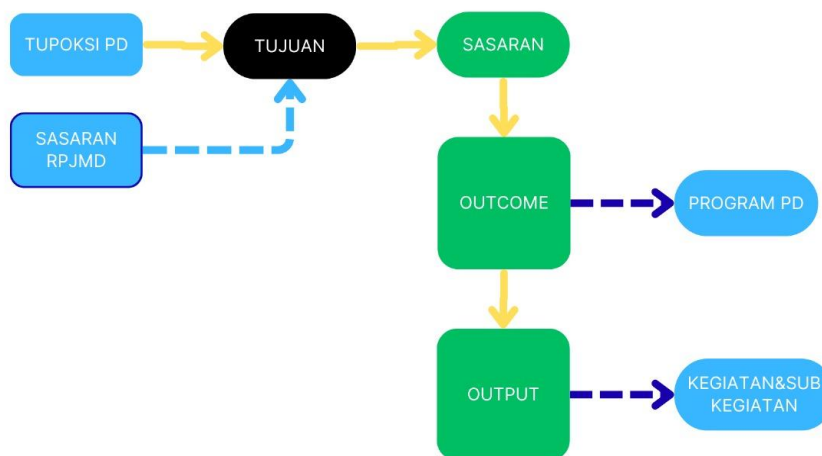
Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
	Pengembangan sistem sanitasi terpadu	Meningkatnya akses sanitasi aman
	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan	Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Meningkatnya Akses air minum masyarakat dan akses sanitasi layak
	Peningkatan aksesibilitas antar desa dan konektivitas antar wilayah	Meningkatkan konektifitas antar wilayah dengan peningkatan kemantapan jalan kewenangan Kabupaten
	Pengembangan Program Padat Karya	Pelibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan



4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN PERANGKAT DAERAH HASIL CASCADING DARI TUJUAN, SASARAN, OUTCOME DAN OUTPUT

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Bapperida yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub-kegiatan. Program, kegiatan dan sub-kegiatan merupakan hasil cascading dari pohon kinerja dalam penentuan final outcome, intermediate outcome, outcome dan output dalam mencapai kinerja Bapperida mulai tahun 2025-2030. Secara lengkap pengambilan program, kegiatan dan sub-kegiatan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Magetan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>NSPK: Melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah urusan Pekerjaan Umum</p> <p>Sasaran RPJMD yang relevan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah</p>	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pekerjaan Umum				Indeks Infrastruktur Pekerjaan umum		
		Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum			Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum		
			Meningkatnya Lahan yang terlayani Irigasi		Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir melalui penguatan mitigasi banjir kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
					Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Embung	
					Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
				Meningkatnya kondisi jaringan irigasi kewenangan kab/kota	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dalam kondisi baik			
					Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi	
					Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
				Terjaganya kondisi Jaringan Irigasi pada UPTD PENGAIRAN GANDONG	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik di UPTD PENGAIRAN GANDONG yang Dipertahankan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terjaganya kondisi Jaringan Irigasi pada UPTD PENGAIRAN BRINGIN	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik di UPTD PENGAIRAN BRINGIN yang Dipertahankan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terjaganya kondisi Jaringan Irigasi pada	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik di UPTD PENGAIRAN GONGGANG yang Dipertahankan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD PENGAIRAN GONGGANG		Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terjaganya kondisi Jaringan Irigasi pada UPTD PENGAIRAN JEJERUK	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik di UPTD PENGAIRAN JEJERUK yang Dipertahankan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terjaganya kondisi Jaringan Irigasi pada UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik di UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI yang Dipertahankan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum		Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap air siap minum (Aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Meningkatnya Akses Air Minum Rumah Tangga	Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
			Meningkatnya sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Persentase peningkatan sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Meningkatnya kapasitas sampah yang dikelola	Jumlah infrastruktur persampahan terbangun	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
			Maningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman(%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Meningkatnya Akses Aman Air Limbah Domestik Rumah Tangga	Jumlah SPALD yang dikelola dan dikembangkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
					Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Penyediaan Unit pengolahan setempat	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya perlindungan terhadap kawasan permukiman rawan banjir		Persentase jaringan drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Meningkatnya kondisi sistem drainase kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang Terpelihara dan/atau Ditingkatkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya kondisi Bangunan Gedung dan		Persentase Bangunan Gedung dan Bangunan Publik Laik Fungsi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bangunan Publik yang sesuai dengan ketentuan				
				Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara	Jumlah Bangunan Gedung dan Bangunan Publik Laik Fungsi	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya Kawasan Startegis yang Memiliki Rencana Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan		Prosentase Kawasan Startegis yang Memiliki Rencana Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jalan kabupaten kondisi mantap		Presentase kemantapan jalan kab/kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Meningkatnya kondisi jalan yang baik	Presentase kondisi jalan yang baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Pengelolaan Leger Jalan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang jembatan yang dilebarkan	Pelebaran Jembatan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Rekonstruksi Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jembatan	
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar	
				Terjaganya kondisi jalan mantap pada UPTD JJCK Wilayah I	Persentase Kemantapan Jalan di UPTD JJCK WILAYAH I yang dipertahankan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin kewenangan UPTD JJCK WILAYAH I	Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin kewenangan UPTD JJCK WILAYAH I	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Terjaganya kondisi jalan mantap pada UPTD JJCK Wilayah II	Persentase Kemantapan Jalan di UPTD JJCK WILAYAH II yang dipertahankan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin kewenangan UPTD JJCK WILAYAH II	Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin kewenangan UPTD JJCK WILAYAH II	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Terjaganya kondisi jalan mantap pada UPTD JJCK Wilayah III	Persentase Kemantapan Jalan di UPTD JJCK WILAYAH III yang dipertahankan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin kewenangan UPTD JJCK WILAYAH III	Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin kewenangan UPTD JJCK WILAYAH III	Pemeliharaan Rutin Jembatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terjaganya kondisi jalan mantap pada UPTD JJCK Wilayah IV	Persentase Kemantapan Jalan di UPTD JJCK WILAYAH IV yang dipertahankan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin kewenangan UPTD JJCK WILAYAH IV	Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin kewenangan UPTD JJCK WILAYAH IV	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			Meningkatnya Kesesuaian Pelaku jasa Konstruksi Terhadap Ketentuan		Persentase pelaku usaha jasa konstruksi yang berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Meningkatnya kompetensi SDM Jasa Konstruksi	Prosentase SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
				Meningkatnya kapasitas kelembagaan jasa konstruksi	Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kapasitas kelembagaan jasa konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pelaku Dan Proses Jasa Konstruksi Sesuai Ketentuan	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan		Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang terpadu	Ketersediaan dokumen terkait Penyusunan RRTR	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang terpadu	Ketersediaan Data Dasar Penyusunan RRTR	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah data SHP Peta Dasar	Penyusunan Peta Dasar	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang terpadu	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang terpadu	Terealisasinya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
					Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Penilaian Perwujudan RTR	
					Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas PUPR			Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran		
					Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			administrasi publik yang efektif dan efisien				
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tercapainya Realisasi Pendapatan dan Belanja	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terselenggaranya pengelolaan BMD yang tertib administrasi	Jumlah laporan pengadministrasi BMD yang disusun	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tercapainya Realisasi Pendapatan dan Belanja	Jumlah Laporan pengelolaan PAD yang disusun	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Meningkatnya orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersusunnya tata kelola administrasi umum dan sarana prasarana pendukung pemerintahan yang berkelanjutan	Jumlah Laporan administrasi umum yang disusun	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terselenggaranya pengelolaan BMD yang tertib administrasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya tata kelola administrasi umum dan sarana prasarana pendukung pemerintahan yang berkelanjutan	Jumlah penyediaan kebutuhan penunjang/ pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terselenggaranya pengelolaan BMD yang tertib administrasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH MENGACU PADA NOMENKLATUR

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029. Berikut disajikan tabel 4.2 tentang rencana program, kegiatan beserta pagu indikatif pada periode tahun Renstra (2025-2029), yang selanjutnya harus dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas PUPR kabupaten Magetan Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
TOTAL					Rp134,320,073,153		Rp149,098,316,013		Rp152,360,847,614		Rp156,983,132,376		Rp158,649,145,613	
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Outcome: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien	Kepuasan ASN Dinas PUPR terhadap layanan kesekretariatan Dinas PUPR Nilai Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran % Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Score		89.01											
		75.33	76.55	Rp 30,886,650,921	77.45	Rp 33,975,316,013	78.61	Rp 37,372,847,614	79.33	Rp 41,110,132,376	80.20	Rp 45,221,145,613		
		89.00	89.02		89.03		89.04		89.05		89.06			
1.03.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun Dokumen	9	9	Rp 540,633,000	9	Rp 594,696,300	9	Rp 654,165,930	9	Rp 719,582,523	9	Rp 791,540,775		
1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	5	5	Rp 359,492,000	5	Rp 395,441,200	5	Rp 434,985,320	5	Rp 478,483,852	5	Rp 526,332,237		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Output: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	4	4	4	Rp 181,141,000	4	Rp 199,255,100	4	Rp 219,180,610	4	Rp 241,098,671	4	Rp 265,208,538	
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Output: Tercapainya Realisasi Pendapatan dan Belanja	Jumlah Laporan keuangan yang disusun Laporan	6	6	6	Rp 25,421,269,198	6	Rp 27,963,396,118	6	Rp 30,759,735,730	6	Rp 33,835,709,303	6	Rp 37,219,280,233	
1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Output: Tersedianya Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan	139	148	258	Rp 25,242,803,198	258	Rp 27,767,083,518	258	Rp 30,543,791,870	258	Rp 33,598,171,057	258	Rp 36,957,988,162	
1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Output: Terlaksananya Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD Laporan	6	6	6	Rp 178,466,000	6	Rp 196,312,600	6	Rp 215,943,860	6	Rp 237,538,246	6	Rp 261,292,071	
1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output: Terselenggaranya pengelolaan BMD yang tertib administrasi	Jumlah laporan pengadministrasi BMD yang disusun Laporan	1	2	1	Rp 116,249,000	1	Rp 127,873,900	1	Rp 140,661,290	1	Rp 154,727,419	1	Rp 170,200,161	
1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Output: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan	1	1	1	Rp 116,249,000	1	Rp 127,873,900	1	Rp 140,661,290	1	Rp 154,727,419	1	Rp 170,200,161	
1.03.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
Output: Tercapainya Realisasi Pendapatan dan Belanja	Jumlah Laporan pengelolaan PAD yang disusun Dokumen	3	3	3	Rp 277,169,700	3	Rp 304,886,670	3	Rp 335,375,337	3	Rp 368,912,871	3	Rp 405,804,158	
1.03.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
Output: Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen	1	1	1	Rp 65,001,250	1	Rp 71,501,375	1	Rp 78,651,513	1	Rp 86,516,664	1	Rp 95,168,330	
1.03.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
Output: Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan	1	1	1	Rp 126,210,050	1	Rp 138,831,055	1	Rp 152,714,161	1	Rp 167,985,577	1	Rp 184,784,134	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Retribusi Daerah Dokumen													
1.03.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
Output: Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen	1	1	1	Rp 85,958,400	1	Rp 94,554,240	1	Rp 104,009,664	1	Rp 114,410,630	1	Rp 125,851,693	
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Output: Meningkatnya orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis Orang	80	91	80	Rp 288,561,000	80	Rp 317,417,100	80	Rp 349,158,810	80	Rp 384,074,691	80	Rp 422,482,160	
1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
Output: Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen	30	30	30	Rp 43,136,000	30	Rp 47,449,600	30	Rp 52,194,560	30	Rp 57,414,016	30	Rp 63,155,418	
1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
Output: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang	75	85	75	Rp 195,425,000	75	Rp 214,967,500	75	Rp 236,464,250	75	Rp 260,110,675	75	Rp 286,121,743	
1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang	5	5	Rp 50,000,000	5	Rp 55,000,000	5	Rp 60,500,000	5	Rp 66,550,000	5	Rp 73,205,000		
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Output: Tersusunnya tata kelola administrasi umum dan sarana prasarana pendukung pemerintahan yang berkelanjutan	Jumlah Laporan administrasi umum yang disusun Laporan	7	7	Rp 760,453,423	7	Rp 836,498,765	7	Rp 920,148,642	7	Rp 1,012,163,506	7	Rp 1,113,379,857		
1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Output: Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket	1	1	Rp 51,766,173	1	Rp 56,942,790	1	Rp 62,637,069	1	Rp 68,900,776	1	Rp 75,790,854		
1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Output: Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket	1	1	Rp 270,032,000	1	Rp 297,035,200	1	Rp 326,738,720	1	Rp 359,412,592	1	Rp 395,353,851		
1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output: Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	1	1	1	Rp 41,000,000	1	Rp 45,100,000	1	Rp 49,610,000	1	Rp 54,571,000	1	Rp 60,028,100	
1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Output: Terlaksananya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	1	1	1	Rp 76,455,000	1	Rp 84,100,500	1	Rp 92,510,550	1	Rp 101,761,605	1	Rp 111,937,766	
1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Output: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	1	1	1	Rp 35,870,250	1	Rp 39,457,275	1	Rp 43,403,003	1	Rp 47,743,303	1	Rp 52,517,633	
1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan Dokumen	3	3	3	Rp 43,340,000	3	Rp 47,674,000	3	Rp 52,441,400	3	Rp 57,685,540	3	Rp 63,454,094	
1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Output: Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	12	12	12	Rp 150,000,000	12	Rp 165,000,000	12	Rp 181,500,000	12	Rp 199,650,000	12	Rp 219,615,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
Output: Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen	16	16	16	Rp 91,990,000	16	Rp 101,189,000	16	Rp 111,307,900	16	Rp 122,438,690	16	Rp 134,682,559	
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Output: Terselenggaranya pengelolaan BMD yang tertib administrasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan Unit	11	6	11	Rp 1,704,424,700	11	Rp 1,874,867,170	11	Rp 2,062,353,887	11	Rp 2,268,589,276	11	Rp 2,495,448,203	
1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Output: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit	6	2	2	Rp 1,434,754,700	2	Rp 1,578,230,170	2	Rp 1,736,053,187	2	Rp 1,909,658,506	2	Rp 2,100,624,356	
1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Output: Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit	19	1	19	Rp 269,670,000	19	Rp 296,637,000	19	Rp 326,300,700	19	Rp 358,930,770	19	Rp 394,823,847	
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Output: Tersusunnya tata kelola administrasi umum dan	Jumlah penyediaan kebutuhan penunjang/	12	12	12	Rp 828,342,900	12	Rp 911,177,190	12	Rp 1,002,294,909	12	Rp 1,102,524,400	12	Rp 1,212,776,840	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
sarana prasarana pendukung pemerintahan yang berkelanjutan	pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Kali													
1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	12	12	12	Rp 220,705,600	12	Rp 242,776,160	12	Rp 267,053,776	12	Rp 293,759,154	12	Rp 323,135,069	
1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	1	1	1	Rp 36,137,300	1	Rp 39,751,030	1	Rp 43,726,133	1	Rp 48,098,746	1	Rp 52,908,621	
1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	12	Rp 571,500,000	12	Rp 628,650,000	12	Rp 691,515,000	12	Rp 760,666,500	12	Rp 836,733,150	
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output: Terselenggaranya pengelolaan BMD yang tertib administrasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara Unit	107	107	107	Rp 949,548,000	107	Rp 1,044,502,800	107	Rp 1,148,953,080	107	Rp 1,263,848,388	107	Rp 1,390,233,227	
1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	100	100	100	Rp 265,120,000	100	Rp 291,632,000	100	Rp 320,795,200	100	Rp 352,874,720	100	Rp 388,162,192	
1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
Output: Terpeliharanya Alat Besar dan perizinan alat besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Unit	5	5	5	Rp 350,000,000	5	Rp 385,000,000	5	Rp 423,500,000	5	Rp 465,850,000	5	Rp 512,435,000	
1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Output: Terpeliharannya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Unit	1	1	1	Rp 192,238,000	1	Rp 211,461,800	1	Rp 232,607,980	1	Rp 255,868,778	1	Rp 281,455,656	
1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Output: Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit	1	1	1	Rp 142,190,000	1	Rp 156,409,000	1	Rp 172,049,900	1	Rp 189,254,890	1	Rp 208,180,379	
TOTAL PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN UPTD PENGAIRAN					Rp 15,200,000,000		Rp 15,250,000,000		Rp 15,250,000,000		Rp 15,250,000,000		Rp 15,250,000,000	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
Output: Meningkatnya Lahan yang terlayani Irigasi	Persentase lahan yang terlayani irigasi %		73.55											
	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota %	93.23		93.25	Rp 12,700,000,000	93.26	Rp 12,750,000,000	93.27	Rp 12,750,000,000	93.28	Rp 12,750,000,000	93.29	Rp 12,750,000,000	
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Persentase Embung dan penampung air lainnya yang masih mampu melayani sampai MT II %		6.30											
	Persentase peningkatan perlindungan	26.81		30.01	Rp 3,750,000,000	33.21	Rp 3,800,000,000	36.41	Rp 3,800,000,000	39.61	Rp 3,800,000,000	42.81	Rp 3,800,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota %													
1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
Output: Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhabilitasi Unit	6	7	6	Rp 200,000,000	6	Rp 250,000,000	6	Rp 250,000,000	6	Rp 250,000,000	6	Rp 250,000,000	
1.03.02.2.01.0072 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota														
Output: Terevaluasinya Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota Dokumen	3	0	3	Rp 100,000,000	3	Rp 100,000,000	3	Rp 100,000,000	3	Rp 100,000,000	3	Rp 100,000,000	
1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
Output: Terbinanya Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberdayakan Lembaga	5	5	5	Rp 300,000,000	5	Rp 300,000,000	5	Rp 300,000,000	5	Rp 300,000,000	5	Rp 300,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota														
Output: Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen	2	4	4	Rp 500,000,000	4	Rp 500,000,000	4	Rp 500,000,000	4	Rp 500,000,000	4	Rp 500,000,000	
1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
Output: Meningkatnya Kapasitas Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun Unit	2	2	2	Rp 1,500,000,000	2	Rp 1,500,000,000	2	Rp 1,500,000,000	2	Rp 1,500,000,000	2	Rp 1,500,000,000	
1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
Output: Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun Unit	2	2	3	Rp 150,000,000	3	Rp 150,000,000	3	Rp 150,000,000	3	Rp 150,000,000	3	Rp 150,000,000	
1.03.02.2.01.0129 Rehabilitasi Embung														
Output: Meningkatnya Kapasitas Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung yang Direhabilitasi Unit	3	0	3	Rp 1,000,000,000	3	Rp 1,000,000,000	3	Rp 1,000,000,000	3	Rp 1,000,000,000	3	Rp 1,000,000,000	
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Meningkatnya kondisi Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik %	61.73	61.73	62.15	Rp 8,950,000,000	62.57	Rp 8,950,000,000	62.99	Rp 8,950,000,000	63.41	Rp 8,950,000,000	63.83	Rp 8,950,000,000	
1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
Output: Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan Km	0.25	0.25	0.25	Rp 1,000,000,000	0.25	Rp 1,000,000,000	0.25	Rp 1,000,000,000	0.25	Rp 1,000,000,000	0.25	Rp 1,000,000,000	
1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
Output: Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Km	0.625	0.75	0.625	Rp 2,500,000,000	0.625	Rp 2,500,000,000	0.625	Rp 2,500,000,000	0.625	Rp 2,500,000,000	0.625	Rp 2,500,000,000	
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
Output: Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Km	0.165	0.375	0.165	Rp 650,000,000	0.165	Rp 650,000,000	0.165	Rp 650,000,000	0.165	Rp 650,000,000	0.165	Rp 650,000,000	
1.03.02.2.02.0042 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah														
Output: Meningkatnya sistem Irigasi kondisi baik	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun Unit	5	2	5	Rp 1,500,000,000	5	Rp 1,500,000,000	5	Rp 1,500,000,000	5	Rp 1,500,000,000	5	Rp 1,500,000,000	
1.03.02.2.02.0043 Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output: Terehabilitasinya Sumur Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi Unit	5	2	5	Rp 2,000,000,000	5	Rp 2,000,000,000	5	Rp 2,000,000,000	5	Rp 2,000,000,000	5	Rp 2,000,000,000	
1.03.02.2.02.0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														
Output: Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun Dokumen	2	2	2	Rp 300,000,000	2	Rp 300,000,000	2	Rp 300,000,000	2	Rp 300,000,000	2	Rp 300,000,000	
1.03.02.2.02.0053 Rehabilitasi Bendung Irigasi														
Output: Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Unit	4	4	4	Rp 1,000,000,000	4	Rp 1,000,000,000	4	Rp 1,000,000,000	4	Rp 1,000,000,000	4	Rp 1,000,000,000	
TOTAL UPTD PENGAIRAN					Rp 2,500,000,000		Rp 2,500,000,000		Rp 2,500,000,000		Rp 2,500,000,000		Rp 2,500,000,000	
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terjaganya kondisi Jaringan Irigasi pada UPTD PENGAIRAN GANDONG	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik di UPTD PENGAIRAN GANDONG yang Dipertahankan %	100	100	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output: Terpeliharanya dan Teroperasikannya Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan UPTD PENGAIRAN GANDONG	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Km	0	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terjaganya kondisi Jaringan Irigasi pada UPTD PENGAIRAN BRINGIN	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik di UPTD PENGAIRAN BRINGIN yang Dipertahankan %	100	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
Output: Terpeliharanya dan Teroperasikannya Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan UPTD PENGAIRAN BRINGIN	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Km	0	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terjaganya kondisi Jaringan Irigasi pada UPTD PENGAIRAN GONGGANG	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik di UPTD PENGAIRAN GONGGANG yang Dipertahankan %	100	100	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
Output: Terpeliharanya dan Teroperasikannya Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan UPTD PENGAIRAN GONGGANG	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Km	0	0.125		Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terjaganya kondisi Jaringan Irigasi pada UPTD PENGAIRAN JEJERUK	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik di UPTD PENGAIRAN JEJERUK yang Dipertahankan %	100	100	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output: Terpeliharanya dan Teroperasikannya Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan UPTD PENGAIRAN JEJERUK	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Km	0	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terjaganya kondisi Jaringan Irigasi pada UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik di UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI yang Dipertahankan %	100	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000	100	Rp 500,000,000
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
Output: Terpeliharanya dan Teroperasikannya Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Km	0	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000	0.125	Rp 500,000,000
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PENYEDIAAN AIR MINUM														
Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum:	Persentase Akses Layanan Air Bersih % Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap air siap minum (Aman) %		94.05											
		35.41		36.41	Rp 5,900,000,000	36.91	Rp 5,900,000,000	37.41	Rp 5,900,000,000	37.91	Rp 5,900,000,000	38.41	Rp 5,900,000,000	
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Meningkatnya jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola dan dikembangkan	Jumlah Sambungan Rumah terlayani SR Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		800											
		50		10.00	Rp 5,900,000,000	10.00	Rp 5,900,000,000	10.00	Rp 5,900,000,000	10.00	Rp 5,900,000,000	10.00	Rp 5,900,000,000	
1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
Output: Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun Dokumen	1	1	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	
1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
(SPAM) Jaringan Perpipaan														
Output: Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan Liter/Detik	8	8	4	Rp 1,610,000,000	4	Rp 1,610,000,000	4	Rp 1,610,000,000	4	Rp 1,610,000,000	4	Rp 1,610,000,000	
1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa														
Output: Terlaksananya, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok SPAM	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	10	11	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
Output: Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun Liter/Detik	2	2.8	2	Rp 1,150,000,000	2	Rp 1,150,000,000	2	Rp 1,150,000,000	2	Rp 1,150,000,000	2	Rp 1,150,000,000	
1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
Output: Teroptimalnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi Unit	3	0	3	Rp 345,000,000	3	Rp 345,000,000	3	Rp 345,000,000	3	Rp 345,000,000	3	Rp 345,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
Output: Meningkatnya Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan SR	400	455	400	Rp 2,300,000,000	400	Rp 2,300,000,000	400	Rp 2,300,000,000	400	Rp 2,300,000,000	400	Rp 2,300,000,000	
1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
Output: Teroptimalkannya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi Unit	0	0	5	Rp 345,000,000	5	Rp 345,000,000	5	Rp 345,000,000	5	Rp 345,000,000	5	Rp 345,000,000	
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL														
Outcome: Meningkatnya sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi % Persentase peningkatan sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS %		94.05											
		73.12		74.80	Rp 1,300,000,000	74.85	Rp 1,300,000,000	74.90	Rp 1,300,000,000	74.95	Rp 1,300,000,000	75.00	Rp 1,300,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Meningkatnya Infrastruktur persampahan	Jumlah Rumah Tangga Terlayani Rumah Tangga		1000											
	Jumlah infrastruktur persampahan terbangun Unit	24		2.00	Rp 1,300,000,000	2.00	Rp 1,300,000,000	2.00	Rp 1,300,000,000	2.00	Rp 1,300,000,000	2.00	Rp 1,300,000,000	
1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS														
Output: Meningkatnya Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS yang ditingkatkan Ton/ Hari	0	1	1	Rp 460,000,000	1	Rp 460,000,000	1	Rp 460,000,000	1	Rp 460,000,000	1	Rp 460,000,000	
1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
Output: Tersusunnya dokumen teknis, koordinasi dan pelayanan infrastruktur persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun Dokumen	0	0	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	
1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS														
Output: Meningkatnya Sarana Pendukung	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/T	0	0	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	PS-3R/TPS yang Disediakan Unit													
1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R														
Output: Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/T PS3R yang dibangun Ton/ Hari	0	1	2	Rp 690,000,000	2	Rp 690,000,000	2	Rp 690,000,000	2	Rp 690,000,000	2	Rp 690,000,000	
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Akses Layanan Sanitasi %		96.35											
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman %	0.75		6.75	Rp 7,357,000,000	9.75	Rp 7,665,000,000	12.75	Rp 7,165,000,000	15.75	Rp 7,665,000,000	18.75	Rp 7,165,000,000	
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Meningkatnya Akses Aman Air Limbah Domestik Rumah Tangga	Jumlah Sambungan Rumah terlayani SR		295											
	Jumlah SPALD yang dikelola dan dikembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	35		45	Rp 7,357,000,000	55	Rp 7,665,000,000	65	Rp 7,165,000,000	75	Rp 7,665,000,000	85	Rp 7,165,000,000	
1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
Output: Meningkatnya Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan M ³ /Hari	4	0	4	Rp 230,000,000	4	Rp 230,000,000	4	Rp 230,000,000	4	Rp 230,000,000	4	Rp 230,000,000	
1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
Output: Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun M ³ /Hari	3	3	3	Rp 575,000,000	3	Rp 575,000,000	3	Rp 575,000,000	3	Rp 575,000,000	3	Rp 575,000,000	
1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
Output: Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi Unit	0	0	1	Rp 230,000,000	1	Rp 230,000,000	1	Rp 230,000,000	1	Rp 230,000,000	1	Rp 230,000,000	
1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
Output: Meningkatnya Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan	200	200	200	Rp 200,000,000	200	Rp 200,000,000	200	Rp 200,000,000	200	Rp 200,000,000	200	Rp 200,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Lumpur Tinja Rumah Tangga													
1.03.05.2.01.0034 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa														
Output: Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sanitasi	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	2	0	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	10	Rp 100,000,000	
1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur tinja (IPLT)														
Output: Terlaksananya pembangunan dan peningkatan IPLT	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terbangun M ³ /Hari	0	0	0.5	Rp 192,000,000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														
Output: Meningkatnya sarana pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan Unit	2	0	0	Rp -	1	Rp 500,000,000	0	Rp -	1	Rp 500,000,000	0	Rp -	
1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
Output: Terlaksananya pembinaan dan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan	75	0	75	Rp 30,000,000	75	Rp 30,000,000	75	Rp 30,000,000	75	Rp 30,000,000	75	Rp 30,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPALD	dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Orang													
1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat														
Output: Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob Rumah Tangga	138	30	Rp 5,750,000,000	200	Rp 5,750,000,000	200	Rp 5,750,000,000	200	Rp 5,750,000,000	200	200	Rp 5,750,000,000	
1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
Output: Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun Dokumen	1	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	1	Rp 50,000,000	
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														
Outcome: Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap kawasan permukiman rawan banjir	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik %		43											
	Persentase jaringan drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik %	41.30	41.70	Rp 9,650,000,000	41.90	Rp 11,650,000,000	42.10	Rp 11,650,000,000	42.30	Rp 11,650,000,000	42.50	Rp 9,650,000,000		
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terlaksananya Sistem Drainase yang Terpelihara dan/atau Ditingkatkan	Jumlah Sistem Drainase yang dibangun Sistem Drainase		5.00											
	Jumlah Sistem Drainase yang Terpelihara dan/atau Ditingkatkan Sistem Drainase Perkotaan	10	7	Rp 9,650,000,000	7	Rp 11,650,000,000	7	Rp 11,650,000,000	7	Rp 11,650,000,000	7	Rp 9,650,000,000		
1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
Output: Terlaksananya Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan Sistem Drainase Perkotaan	8	7	5	Rp 8,000,000,000	7	Rp 10,000,000,000	7	Rp 10,000,000,000	7	Rp 10,000,000,000	5	Rp 8,000,000,000	
1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output: Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun Dokumen	2	2	1	Rp 150,000,000	1	Rp 150,000,000	1	Rp 150,000,000	1	Rp 150,000,000	1	Rp 150,000,000	
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
Output: Terlaksananya Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara Sistem Drainase Perkotaan	2	1	2	Rp 1,500,000,000	2	Rp 1,500,000,000	2	Rp 1,500,000,000	2	Rp 1,500,000,000	2	Rp 1,500,000,000	
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														
Outcome: Meningkatnya kualitas Bangunan Gedung dan Bangunan Publik yang sesuai dengan ketentuan	Persentase Bangunan Gedung dan Bangunan Publik Laik Fungsi %	44.00	44.20	44.90	Rp 23,500,000,000	45.50	Rp 23,500,000,000	46.50	Rp 23,500,000,000	47.00	Rp 23,500,000,000	48%	Rp 23,500,000,000	
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung														
Output: Terlaksananya Bangunan Gedung dan Bangunan Publik yang Laik Fungsi	Jumlah Bangunan Gedung dan Bangunan Publik Laik Fungsi Bangunan	59	60	64	Rp 23,500,000,000	79	Rp 23,500,000,000	94	Rp 23,500,000,000	109	Rp 23,500,000,000	124 Bangunan	Rp 23,500,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terlaksananya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala Bangunan Gedung	9	6	15	Rp 15,000,000,000	15	Rp 15,000,000,000	15	Rp 15,000,000,000	15	Rp 15,000,000,000	15 Bangunan gedung	Rp 15,000,000,000	
1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
Output: Tersedianya Dokumen terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dokumen	1	1	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1 Dokumen	Rp 200,000,000	
1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota														
Output: Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bantuan Teknis	2	2	3	Rp 50,000,000	3	Rp 50,000,000	3	Rp 50,000,000	3	Rp 50,000,000	3 Bantuan Teknis	Rp 50,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Tersedianya Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen	10	10	6	Rp 8,000,000,000	6	Rp 8,000,000,000	6	Rp 8,000,000,000	6	Rp 8,000,000,000	6 Dokumen	Rp 8,000,000,000	
1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
Output: Terlaksananya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan	150	150	250	Rp 250,000,000	250	Rp 250,000,000	250	Rp 250,000,000	250	Rp 250,000,000	250 Dokumen	Rp 250,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Dokumen													
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														
Outcome: Meningkatnya kualitas Perencanaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	Prosentase Kawasan Strategis yang Memiliki Rencana Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan %	0	0	5	Rp 550,000,000	6	Rp 2,300,000,000	7	Rp 2,300,000,000	8	Rp 2,300,000,000	9	Rp 2,000,000,000	
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan Dokumen	0		1	Rp 550,000,000	1	Rp 2,300,000,000	1	Rp 2,300,000,000	1	Rp 2,300,000,000	1	Rp 2,000,000,000	
1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output: Tersedianya Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen	0	0	1	Rp 300,000,000	1	Rp 300,000,000	1	Rp 300,000,000	1	Rp 300,000,000	0	Rp -	
1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan	0	0	1	Rp 250,000,000	1	Rp 2,000,000,000	1	Rp 2,000,000,000	1	Rp 2,000,000,000	1	Rp 2,000,000,000	
TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN UPTD JJCK					Rp 37,446,422,232		Rp 44,828,000,000		Rp 45,078,000,000		Rp 45,378,000,000		Rp 45,678,000,000	
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														
Outcome: Meningkatnya jalan kabupaten kondisi mantap	Indeks Konektivitas		68.4											
	Presentase kemantapan jalan kab/kota %	84.66		85.66	Rp 34,176,422,232	86.16	Rp 41,358,000,000	86.66	Rp 41,358,000,000	87.16	Rp 41,358,000,000	87.66	Rp 41,358,000,000	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota														
Output: Meningkatnya kondisi jalan yang baik	Persentase kondisi jalan yang layak %		86.61											
	Presentase kondisi jalan yang baik %	13.01		13.31	Rp 34,176,422,232	13.46	Rp 41,358,000,000	13.61	Rp 41,358,000,000	13.76	Rp 41,358,000,000	13.91	Rp 41,358,000,000	
1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output: Terkelolanya leger jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola Dokumen	4	4	4	Rp 420,000,000	4	Rp 455,000,000	4	Rp 430,000,000	4	Rp 455,000,000	4	Rp 470,000,000	
1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
Output: Terlaksananya survey kondisi jalan/jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya Km	683.61	683.61	687.15	Rp 720,000,000	683.61	Rp 368,000,000	687.15	Rp 720,000,000	683.61	Rp 368,000,000	687.15	Rp 720,000,000	
1.03.10.2.01.0049 Pelebaran Jembatan														
Output: Terselenggaranya Preservasi jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan Meter	0	0	0	Rp -	5	Rp 2,500,000,000	5	Rp 2,500,000,000	5	Rp 2,500,000,000	5	Rp 2,500,000,000	
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan														
Output: Terselenggaranya pemeliharaan jalan secara rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin Km	42	40	39	Rp 14,574,000,000	40	Rp 15,000,000,000	40	Rp 15,000,000,000	40	Rp 15,000,000,000	40	Rp 15,000,000,000	
1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan														
Output: Terehabilitasinya kondisi jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi Km	22.57	9.58	6.89	Rp 5,442,092,000	6.89	Rp 5,500,000,000	6.89	Rp 5,500,000,000	6.89	Rp 5,500,000,000	6.89	Rp 5,500,000,000	
1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan														
Output: Terpeliharannya kondisi jalan secara berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala Km	18.93	6.63	7.71	Rp 8,290,000,000	7.65	Rp 8,255,000,000	7.35	Rp 7,928,000,000	7.65	Rp 8,255,000,000	7.3	Rp 7,888,000,000	
1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan														
Output: Terehabilitasinya kondisi jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi Meter	3	3	3	Rp 450,000,000	5	Rp 2,500,000,000	5	Rp 2,500,000,000	5	Rp 2,500,000,000	5	Rp 2,500,000,000	
1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T.	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output: Terekonstruksinya kondisi jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi Km	1.19	4.89	1.44	Rp 2,760,000,000	1.44	Rp 2,760,000,000	1.44	Rp 2,760,000,000	1.44	Rp 2,760,000,000	1.44	Rp 2,760,000,000	
1.03.10.2.01.0061 Pemeliharaan Berkala Jembatan														
Output: Terpeliharannya kondisi jembatan secara berkala	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala Meter	0	0	0	Rp -	5	Rp 2,500,000,000	5	Rp 2,500,000,000	5	Rp 2,500,000,000	5	Rp 2,500,000,000	
1.03.10.2.01.0068 Pelebaran Jalan Menuju Standar														
Output: Terselenggaranya Preservasi jalan	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar Km	6.7	3.44	0.99	Rp 1,520,330,232	0.99	Rp 1,520,000,000	0.99	Rp 1,520,000,000	0.99	Rp 1,520,000,000	0.99	Rp 1,520,000,000	
TOTAL UPTD JJCK					Rp 3,270,000,000		Rp 3,470,000,000		Rp 3,720,000,000		Rp 4,020,000,000		Rp 4,320,000,000	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota														
Output: Mempertahankan Kondisi Kemantapan Jalan di UPTD JJCK Wilayah I	Persentase Kemantapan Jalan di UPTD JJCK WILAYAH I yang dipertahankan %	100	0	100	Rp 570,000,000	100	Rp 570,000,000	100	Rp 570,000,000	100	Rp 570,000,000	100	Rp 570,000,000	
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan														
Output: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan yang menjadi Kewenangan UPTD JJCK Wilayah I	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin Km	7	7	7	Rp 520,000,000	7	Rp 520,000,000	7	Rp 520,000,000	7	Rp 520,000,000	7	Rp 520,000,000	
1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan														
Output: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara	1	1	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Jembatan yang menjadi Kewenangan UPTD JJCK Wilayah I	Secara Rutin Jembatan													
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota														
Output: Mempertahankan Kondisi Kemantapan Jalan di UPTD JJCK Wilayah II	Persentase Kemantapan Jalan di UPTD JJCK WILAYAH II yang dipertahankan %	100	100	100	Rp 950,000,000	100	Rp 1,025,000,000	100	Rp 1,100,000,000	100	Rp 1,200,000,000	100	Rp 1,300,000,000	
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan														
Output: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan yang menjadi Kewenangan UPTD JJCK Wilayah II	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin Km	16	16	16	Rp 850,000,000	16	Rp 900,000,000	16	Rp 950,000,000	16	Rp 1,000,000,000	16	Rp 1,050,000,000	
1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan														
Output: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan yang menjadi Kewenangan UPTD JJCK Wilayah II	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Jembatan	4	4	4	Rp 100,000,000	4	Rp 125,000,000	4	Rp 150,000,000	4	Rp 200,000,000	4	Rp 250,000,000	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota														
Output: Mempertahankan Kondisi Kemantapan Jalan di UPTD JJCK Wilayah III	Persentase Kemantapan Jalan di UPTD JJCK WILAYAH III yang dipertahankan %	100	100	100	Rp 900,000,000	100	Rp 975,000,000	100	Rp 1,050,000,000	100	Rp 1,150,000,000	100	Rp 1,250,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan														
Output: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan yang menjadi Kewenangan UPTD JJCK Wilayah III	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin Km	16	16	16	Rp 800,000,000	16	Rp 850,000,000	16	Rp 900,000,000	16	Rp 950,000,000	16	Rp 1,000,000,000	
1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan														
Output: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan yang menjadi Kewenangan UPTD JJCK Wilayah III	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Jembatan	4	4	4	Rp 100,000,000	4	Rp 125,000,000	4	Rp 150,000,000	4	Rp 200,000,000	4	Rp 250,000,000	
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota														
Output: Mempertahankan Kondisi Kemantapan Jalan di UPTD JJCK Wilayah IV	Persentase Kemantapan Jalan di UPTD JJCK WILAYAH IV yang dipertahankan %	100	100	100	Rp 850,000,000	100	Rp 900,000,000	100	Rp 1,000,000,000	100	Rp 1,100,000,000	100	Rp 1,200,000,000	
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan														
Output: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan yang menjadi Kewenangan UPTD JJCK Wilayah IV	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin Km	16	16	16	Rp 800,000,000	16	Rp 800,000,000	16	Rp 850,000,000	16	Rp 900,000,000	16	Rp 950,000,000	
1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan														
Output: Terlaksananya	Jumlah Jembatan yang Dipelihara	4	4	4	Rp 50,000,000	4	Rp 100,000,000	4	Rp 150,000,000	4	Rp 200,000,000	4	Rp 250,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pemeliharaan Rutin Jembatan yang menjadi Kewenangan UPTD JJCK Wilayah IV	Secara Rutin Jembatan													
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
Outcome: Meningkatnya Kesesuaian Pelaku jasa Konstruksi Terhadap Ketentuan	Persentase Kesesuaian Pelaku Jasa Konstruksi Terhadap Ketentuan %		51.5											
	Persentase pelaku usaha jasa konstruksi yang baik %	0	41.83	Rp 530,000,000	55.17	Rp 730,000,000	73.67	Rp 845,000,000	86.92	Rp 930,000,000	100	Rp 985,000,000		
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi														
Output: Meningkatnya kompetensi SDM Jasa Konstruksi	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan tenaga terampil yang disusun Orang		300											
	Prosentase SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi %	45.50	65.50	Rp 245,000,000	71.50	Rp 325,000,000	84.50	Rp 400,000,000	92.20	Rp 475,000,000	100	Rp 525,000,000		
1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
Output: Terlaksananya Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	0	300	170	Rp 195,000,000	200	Rp 250,000,000	210	Rp 300,000,000	225	Rp 350,000,000	230	Rp 400,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	yang Difasilitasi Sertifikasi Orang													
1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
Output: Terlaksananya Pembinaan dan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga	30	30	25	Rp 50,000,000	40	Rp 75,000,000	60	Rp 100,000,000	38	Rp 125,000,000	37	Rp 125,000,000	
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Meningkatnya kapasitas kelembagaan jasa konstruksi	Ketersediaan data penyediaan jasa konstruksi yang diperbarui Dokumen		2											
	Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun Dokumen	1	1	1	Rp 65,000,000	1	Rp 80,000,000	1	Rp 95,000,000	1	Rp 105,000,000	1	Rp 110,000,000	
1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
Output: Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Menyediakan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan Dokumen	1	1	1	Rp 15,000,000	1	Rp 20,000,000	1	Rp 25,000,000	1	Rp 30,000,000	1	Rp 30,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
Output: Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Menyediakan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan Layanan Informasi	1	1	1	Rp 50,000,000	1	Rp 60,000,000	1	Rp 70,000,000	1	Rp 75,000,000	1	Rp 80,000,000	
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi														
Output: Meningkatnya kapasitas kelembagaan jasa konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi Laporan Jumlah Pengawasan Pelaku Dan Proses Jasa Konstruksi yang Sesuai dengan Ketentuan Lembaga		1											
		0		40	Rp 220,000,000	60	Rp 325,000,000	80	Rp 350,000,000	80	Rp 350,000,000	80	Rp 350,000,000	
1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
Output: Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,	0	0	40	Rp 60,000,000	60	Rp 100,000,000	80	Rp 125,000,000	80	Rp 125,000,000	80	Rp 125,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	dan Tertib Pemanfaatan Produk Lembaga													
1.03.11.2.04.0010 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota														
Output: Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Dokumen	1	1	1	Rp 160,000,000	1	Rp 225,000,000	1	Rp 225,000,000	1	Rp 225,000,000	1	Rp 225,000,000	
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase keselarasan RTR dengan Dokumen perencanaan yang lain %		47.37											
	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota %	100.00		100	Rp 2,000,000,000	100	Rp 2,000,000,000	100	Rp 2,000,000,000	100	Rp 2,000,000,000	100	Rp 2,000,000,000	
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota														
Output: Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan	Ketersediaan dokumen terkait Penyusunan RRTR Dokumen	5	6	1	Rp 450,000,000	1	Rp 450,000,000	1	Rp 450,000,000	1	Rp 450,000,000	1	Rp 450,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
pengendalian penataan ruang yang tepadu														
1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
Output: Tersusunnya dokumen administrasi RDTR Kab/Kota Pralinsek dan Persetujuan Substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota Dokumen	2	3	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	
1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
Output: Tersusunnya Perkada RDTR Kabupaten/Kota siap integrasi OSS	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota Dokumen	0	0	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	
1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
Output: Tersusunnya laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Laporan	0	0	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	1	Rp 50,000,000	
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan	Ketersediaan Data Dasar Penyusunan RRTR Laporan	0	2	2	Rp 350,000,000	2	Rp 350,000,000	2	Rp 350,000,000	2	Rp 350,000,000	2	Rp 350,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
pengendalian penataan ruang yang tepadu														
1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar														
Output: Tersusunnya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar Peta	0	0	1	Rp 150,000,000	1	Rp 150,000,000	1	Rp 150,000,000	1	Rp 150,000,000	1	Rp 150,000,000	
1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
Output: Tersusunnya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota Dokumen	0	0	4	Rp 200,000,000	4	Rp 200,000,000	4	Rp 200,000,000	4	Rp 200,000,000	4	Rp 200,000,000	
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang tepadu	Jumlah dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Dokumen		16											
	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah Hari	0		28	Rp 450,000,000	28	Rp 450,000,000	27	Rp 450,000,000	27	Rp 450,000,000	27	Rp 450,000,000	
1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
Output: Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Dokumen	12	0	12	Rp 50,000,000	12	Rp 50,000,000	12	Rp 50,000,000	12	Rp 50,000,000	12	Rp 50,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
Output: Terlaksananya layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku Layanan	303	0	312	Rp 200,000,000	312	Rp 200,000,000	312	Rp 200,000,000	312	Rp 200,000,000	312	Rp 200,000,000	
1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
Output: Terlaksananya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang Dokumen	4	4	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	
1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
Output: Meningkatnya sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Sistem Informasi	0	0	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
Output: Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang terpadu	Jumlah dokumen hasil penilaian rekomendasi tata ruang Domuen		16											
	Jumlah Instrumen Monitoring & Evaluasi Efektivitas Pengendalian	0	0	12	Rp 750,000,000	12	Rp 750,000,000	12	Rp 750,000,000	12	Rp 750,000,000	12	Rp 750,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Dokumen													
1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
Output: Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dokumen	12	12	4	Rp 50,000,000	4	Rp 50,000,000	4	Rp 50,000,000	4	Rp 50,000,000	4	Rp 50,000,000	
1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang														
Output: Terlaksananya Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang Kasus	0	0	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	
1.03.12.2.04.0007 Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														
Output: Terlaksananya Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif Kasus	0	0	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	
1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
Output: Terlaksananya Penilaian Pelaksanaan	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian	0	0	12	Rp 200,000,000	12	Rp 200,000,000	12	Rp 200,000,000	12	Rp 200,000,000	12	Rp 200,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KE T.
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dokumen													
1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
Output: Terlaksananya Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat Dokumen	12	12	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	
1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR														
Output: Terlaksananya Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR Dokumen	0	0	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	
1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang														
Output: Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang Berta Acara	0	0	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	

4.3 SUB-KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Mendukung sasaran RPJMD " Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah "
2			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
3			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
4			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
5			Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	
6			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
7			Penyediaan Unit pengolahan setempat	
8			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
10			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
11			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	

No	Program Prioritas	Outcome	Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
12			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
13			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
14			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
15			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
17			Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
18			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
19			Penyusunan Peta Dasar	
20			Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
21			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
22			Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
23			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
24			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
25			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
26			Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
27			Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
28			Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
29			Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
30			Penilaian Perwujudan RTR	
31			Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	

No	Program Prioritas	Outcome	Sub-Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
32	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Lahan yang terlayani Irigasi	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
33			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
34			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
35			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
36			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
37			Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
38			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
39			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
40			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
41			Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
42			Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
43			Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
44			Rehabilitasi Bendung Irigasi	
45	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya jalan kabupaten kondisi mantap	Pengelolaan Leger Jalan	
46			Rekonstruksi Jalan	
47			Pemeliharaan Berkala Jalan	
48			Pelebaran Jalan Menuju Standar	
49			Rehabilitasi Jembatan	
50			Pemeliharaan Berkala Jembatan	
51			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
52			Rehabilitasi Jalan	
53			Pemeliharaan Rutin Jalan	
54			Pelebaran Jembatan	

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kab. Magetan Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indeks Layanan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum	%	77,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	46,82	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum	%	n/a	65,10	66,90	69,22	70,65	72,40	
	Nilai SAKIP	Skor	93,29	94,08	94,09	94,10	94,11	94,12	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	89,01	89,02	89,03	89,04	89,05	89,06	

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas PUPR Kab. Magetan
Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	26,81	28,41	30,01	33,21	36,41	39,61	42,81	
2	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	93,23	93,24	93,25	93,26	93,27	93,28	93,29	
3	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	61,37	61,73	62,15	62,57	62,99	63,41	63,83	
4	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah rumah tangga di kabupaten/kota	%	35,41	35,91	36,41	36,91	37,41	37,91	38,41	
5	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan Akses sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	0,75	3,75	6,75	9,75	12,75	15,75	18,75	
6	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	44	44,05	44,10	44,15	44,20	44,25	44,30	
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	84,66	85,16	85,66	86,16	86,66	87,16	87,66	
8	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	45,50	51,50	61,50	71,10	84,50	92,20	100	
9	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	0	20	30	40	50	60	70	
10	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai	Hari	28	28	28	28	27	27	27	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah									
11	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2030 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai upaya penjabaran atas program daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan 2025 – 2029, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tersusunnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 – 2029 tersebut merupakan langkah penting dan strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang karena beberapa alasan mendasar yang secara inhern menjelaskan makna eksistensinya sebagai berikut :

1. Dokumen RENSTRA Dinas dapat menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam meningkatkan kinerja internal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang secara terukur, terarah dan berkelanjutan, baik yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan;
2. Pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam mengejawantahkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4. Menjadi rujukan dan arahan bagi setiap aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam menyusun orientasi kinerja guna pencapaian cita-cita kelembagaan yang lebih baik dan optimal.

Meskipun secara teknokratis sisi komprehensif sebuah dokumen perencanaan dapat dibangun dengan baik, namun nilai keberhasilan atas perencanaan tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama baik aparatur internal, pimpinan dan stakeholders lainnya dalam implementasinya. Oleh karenanya pemahaman bersama atas dokumen perencanaan yang telah tersusun ini menjadi sangat penting guna menumbuhkembangkan perspektif yang selaras atas cita-cita luhur pencapaian kinerja kelembagaan pada tingkat pelayanan yang lebih baik dan optimal di masa mendatang .

Pada akhirnya, semoga kehadiran dan eksistensi dokumen rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, terutama dalam mencapai pengelolaan infrastruktur daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Magetan .

Magetan, 19 Desember 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Magetan



MUNTAR WAKID, S.ST., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671216 199403 1 005